PROFIL KEJADIAN BENCANA PROVINSI SUMATERA SELATAN

Alamat : Ex. Kanwil Perhubungan Sumatera Selatan

Jl. Arah Bandara SMB II Palembang Telp. 0711 – 385108, Fax. 0711 – 385107

email : bpbd.sumsel@yahoo.com/bpbdprovsumsel@gmail.com

Profil Kejadian Bencana
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2015-2020

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KATA PENGANTAR

Publikasi Profil Kejadian Bencan Provinsi Sumatera Selatan diterbitkan setiap tahunnya dan dimulai sejak tahun 2020. Publikasi ini merupakan kumpulan data primer dan sekunder kondisi Provinsi sumatera Selatan, Instansi BPBD dan kejadian bencana. Provinsi Sumatera Selatan Berbagai jenis data terangkum dalam publikasi ini. Data disajikan dalam bentuk tabel-tabel, grafik dan analisis ringkas pada setiap bab. Profil Kejadian Bencana (PKB) ini akan menunjukkan jenis, frekuensi dan rekomendasi dari kejadian bencana yang terjadi dari tahun 2015 sampai dengan 2020 didukung oleh data dan informasi sekunder lainnya sebagai justifikasi kualitatif sehingga dapat menjadi acuan mitigasi yang secara preventif diharapkan dapat meningkatkan kapasitas untuk menurunkan resiko akibat bencana.

Dengan terbitnya publikasi ini diharapkan kebutuhan berbagai stakeholder dan masyarakat akan data kebencanaan dapat terpenuhi. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan publikasi ini. Kami menyadari publikasi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, format dan isi dari publikasi ini akan terus diperbaiki dan diharapkan saran serta kritik membangun dari para pembaca demi kesempurnaan publikasi ini.

Palembang, Januari 2021
Kepala Pelaksana BPBD
Provinsi Sumatera Selatan

Ir. Iriansyah, S.Sos., S.Km., M.Kes.
NIP. 196310161985011001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vi
DAFTAR GAMBAR viii
DAFTAR TABEL ix
BAB 1. PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan 2
1.3 Ruang Lingkup 2
1.4 Landasan Hukum 3
1.5 Pengertian-Pengertian 5
1.6 Sistematika Penulisan 7
1.7 Metodologi 8
BAB II. KONDISI UMUM WILAYAH 9
2.1 Geografis 9
2.2 Topografis 10
2.3 Demografis 12
2.4 Iklim 12
2.5 Ekoregion, Hutan dan Sungai 14
BAB III. SEKILAS TENTANG BPBD SUMATERA SELATAN 17
3.1 Sejarah Singkat 17
3.2 Struktur, Tugas, Pokok dan Fungsi Organisasi 18
3.3 Sumber Daya Manusia 21
3.4 Sarana dan Prasarana 22
3.5 Keberadaan SOP 24
3.6 Program, Layanan dan Pendanaan 24
3.6.1 Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 24
3.6.2 Layanan Tanggap Darurat Bencana 25
3.6.3 Layanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 27
3.6.4 Layanan Kesehatan Korban Bencana 28
3.6.5 Layanan Pusdalops PB 29
3.7 Pendanaan 29
3.8 Capaian Prestasi 32
BAB IV. KEJADIAN BENCANA 34
4.1 Data Kejadian Bencana Berdasarkan Jenis Bencana 36
4.1.1 Banjir 36
4.1.2 Puting Beliung 37
4.1.3 Banjir Bandang 38
4.1.4 Tanah Longsor 39
4.1.5 Kecelakaan Kapal 40
4.1.6 Kebakaran Pemukiman 41
4.1.7 Gempa Bumi 42

4.1.8 Kebakaran Lahan dan Hutan....43
4.1.9 Pandemi Covid-19....44
4.2 Data Kejadian Bencana Berdasarkan Wilayah....47
4.2.1 Kabupaten Ogan Komering Ulu....47
4.2.2 Kabupaten Ogan Komering Ilir....49
4.2.3 Kabupaten Muara Enim....50
4.2.4 Kabupaten Lahat....52
4.2.5 Kabupaten Musi Rawas....54
4.2.6 Kabupaten Musi Banyuasin....55
4.2.7 Kabupaten Banyuasin....57
4.2.8 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan....59
4.2.9 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur....61
4.2.10 Kabupaten Ogan Ilir....62
4.2.11 Kabupaten Empat Lawang....64
4.2.12 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)....65
4.2.13 Kabupaten Musi Rawas Utara....66
4.2.14 Kota Palembang....68
4.2.15 Kota Prabumulih....69
4.2.16 Kota Pagar Alam....70
4.2.17 Kota Lubuk Linggau....72
sDAFTAR PUSTAKA....75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Iklim Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2019 13
Gambar 2. Kelembaban Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2019.14
Gambar 3. Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan 14
Gambar 4. Struktur Organisasi BPBD Sumatera Selatan 20
Gambar 5. Peta Realisasi Water Bombing.....26
Gambar 6. Peta Indeks Risiko Bencana Prov. Sumatera Selatan.....34
Gambar 7. Kejadian Bencana Banjir Tahun 2015-2020.....37
Gambar 8. Kejadian Bencana Puting Beliung Tahun 2015-2020.....38
Gambar 9. Kejadian Bencana Banjir Bandang Tahun 2015-2020.....39
Gambar 10. Kejadian Bencana Tanah Longsor Tahun 2015-2020.....40
Gambar 11. Kejadian Bencana Banjir Tahun 2015-2020.....41
Gambar 12. Kejadian Bencana Banjir Tahun 2015-2020.....42
Gambar 13. Kejadian Bencana Banjir Tahun 2015-2020.....43
Gambar 14. Data Kejadian Bencana Kab. OKU Tahun 2015-2020 48
Gambar 15. Data Kejadian Bencana Kab. OKI Tahun 2015-2020.....50
Gambar 16. Data Kejadian Bencana Kab. Muara Enim 2015-2020.....51
Gambar 17. Data Kejadian Bencana Kab.n Lahat 2015-2020 53
Gambar 18. Data Kejadian Bencana Kab. Musi Rawas 2015-2020.....55
Gambar 19. Data Kejadian Bencana Kab. Musi Banyuasin 2015-2020.56
Gambar 20. Data Kejadian Bencana Kab. Banyuasin 2015-2020.....58
Gambar 21. Data Kejadian Bencana Kab. OKU Selatan 2015-2020 60
Gambar 22. Data Kejadian Bencana Kab. Oku Timur 2015-2020.....62
Gambar 23. Data Kejadian Bencana Kab. Ogan Ilir 2015-2020.....63
Gambar 24. Data Kejadian Bencana Kab. Empat Lawang 2015-2020 ..65
Gambar 25. Data Kejadian Bencana Kab. Pali Tahun 2015-2020 66
Gambar 26. Data Kejadian Bencana Kab. Muratara Tahun 2015-2020.67
Gambar 27. Data Kejadian Bencana Kota Palembang 2015-2020 69
Gambar 28. Data Kejadian Bencana Kota Prabumulih 2015-2020 70
Gambar 29. Data Kejadian Bencana Kota Pagar Alam 2015-2020.....71
Gambar 30. Data Kejadian Bencana Kota Lubuk Linggau 2015-2020...72

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Potensi Luas dan Kelas Bahaya di Sumatera Selatan Tahun ... 1
TabeL 2. Karakteristik Geografis dan Demografis 11
Tabel 3. Luas dan Penyebaran Lahan Kritis Sumatera Selatan 15
Tabel 4. Data SDM PNS BPBD Prov. Sumsel Tahun 2019..... 21
Tabel 5. Sarana Dan Prasarana BPBD Provinsi Sumatera Selatan 22
Tabel 6. Data Peralatan BPBD Provinsi Sumatera Selatan..... 22
Tabel 7. Data Logistik BPBD Provinsi Sumatera Selatan..... 23
Tabel 8. Data Kendaraan Operasional BPBD Sumatera Selatan..... 23
Tabel 9. Kendaraan Operasional Bantuan dari BNPB..... 23
Tabel 10. Tingkat capaian Kinerja 25
Tabel 11. Realisasi Anggaran Tahun 2015-2020 31
Tabel 12. Potensi Kelas Bahaya Bencana Sumatera Selatan..... 35
Tabel 13. Data Perkembangan Pandemi Covid 19..... 44
Tabel 14. Jumlah Hotspot dan Lokasi serta Luas Areal karhutla..... 46

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang berdasarkan letak geografisnya dilalui oleh tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Samudra Pasifik. Kondisi tersebut menjadikan negara Indonesia sebagai "supermarket" bencana (Haryadi 2012). Berbagai bencana yang terjadi di antaranya termasuk bencana geologi (gempa bumi, aktivitas vulkanik) dan bencana hidrologi (banjir, tanah longsor, tsunami) (Oktari 2019). Hal ini menjadikan Indonesia selalu masuk dalam 5 besar negara dengan tingkat bencana alam tertinggi di dunia (Guha-Sapir et al. 2016; Duffin 2020).

Salah satu wilayah yang memiliki potensi bencana kelas sedang-tinggi adalah Provinsi Sumatera Selatan. Data Indeks bencana Sumsel dan kabupatennya (RBI) (BNPB 2016) menunjukkan bahwa terdapat 11 potensi bencana yang terjadi, 9 diantaranya masuk dalam kelas tinggi dan sisanya masuk kelas sedang (Tabel 1).

Tabel 1. Potensi Luas dan Kelas Bahaya di Sumatera Selatan Tahun 2016-2020

No	Bencana	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1.	Banjir	6.923.020	Tinggi
2.	Banjir Bandang	130.594	Tinggi
3.	Cuaca Ekstrim	7.481.159	Tinggi
4.	Epidemi Dan Wabah Penyakit	44.381	Tinggi
5.	Gelombang Ekstrim Dan Abrasi	18.516	Sedang
6.	Gempabumi	8.624.255	Tinggi
7.	Kebakaran Hutan Dan Lahan	3.636.490	Tinggi
8.	Kegagalan Teknologi	2.125	Tinggi
9.	Kekeringan	8.624.248	Tinggi
10.	Letusan Gunungapi Dempo	25.619	Sedang
11.	Tanah Longsor	779.864	Tinggi

Seiring dengan data dan kondisi bencana yang secara umum melanda Indonesia dan Sumatera Selatan, maka diperlukan berbagai program dan kebijakan. Penyusunan program dan kebijakan harus dilandasi data dan kajian yang komprehensif sehingga dapat menjadi solusi yang efektif dan efisien. Hal ini juga sebagai amanat Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-undang tersebut didukung dengan adanya Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.

Salah satu data dan kajian yang harus menjadi landasan kebijakan, program dan penyusunan dokumen kajian risiko bencana adalah profil kejadian bencana. Profil Kejadian Bencana (PKB) ini akan menunjukkan jenis, frekuensi dan rekomendasi dari kejadian bencana yang terjadi dari tahun 2015 sampai dengan 2020 didukung oleh data dan informasi sekunder lainnya sebagai justifikasi kualitatif sehingga dapat menjadi acuan mitigasi yang secara preventif diharapkan dapat meningkatkan kapasitas untuk menurunkan resiko akibat bencana.

1.2 Tujuan

Dokumen PKB Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 ini memiliki tujuan:

1. Pada tatanan pemerintah digunakan sebagai dasar untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana daerah khususnya Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, dokumen ini juga dapat menjadi bahan monitoring dan evaluasi terhadap dokumen Kajian Risiko Bencana yang disusun pada tahun 2015 untuk tahun 2016-2020.
2. Pada tatanan mitra pemerintah digunakan sebagai dasar untuk melakukan aksi pendampingan maupun intervensi teknis langsung ke komunitas terpapar untuk mengurangi risiko bencana.
3. Pada tatanan masyarakat umum dapat digunakan sebagai salah satu dasar untuk menyusun aksi praktis dalam rangka kesiapsiagaan, seperti menyusun rencana dan jalur evakuasi, pengambilan keputusan daerah tempat tinggal, dan sebagainya.

1.3 Ruang Lingkup

Dokumen PKB Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2020 disusun berdasarkan beberapa pengembangan pengkajian terkait metodologi pengkajian dari penyusunan sebelumnya. Dasar pengkajian dilaksanakan adalah dari pedoman umum pengkajian risiko bencana dan referensi pedoman lainnya yang ada di kementerian/lembaga terkait lain di tingkat nasional sehingga lingkup dalam penyusunan dokumen dibatasi seperti berikut:

1. Untuk jenis bencana yang sama, pengkajian dilakukan untuk melihat perkembangan dan perubahan kejadian bencana yang dikomparasi terhadap dokumen kajian risiko bencana.
2. Untuk jenis bencana baru maka pengkajian dilakukan untuk melihat tingkat bahaya bencana dan kapasitas penanggulangan.
3. Rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana berdasarkan hasil kajian dan tindakan-tindakan tanggap dan penganggulangan bencana yang telah dilakukan.
4. Kajian kejadian bencana dilakukan terhadap data dan informasi yang terinput di pangkalan data BPBD Sumatera Selatan.

1.4 Landasan Hukum

Penyusunan Dokumen KRB berdasarkan pada landasan hukum dari tingkat nasional hingga daerah. Landasan hukum tersebut sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Suamtera Selatan;

16. Peraturan Daerah Provinsi Suamtera Selatan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

1.5 Pengertian-Pengertian

Berikut beberapa pengertian terkait pemahaman dalam penyusunan Dokumen KRB Provinsi Sumsel Tahun 2020.

1. **Badan Nasional Penanggulangan Bencana**, yang selanjutnya disingkat dengan **BNPB** adalah lembaga pemerintah non departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**, yang selanjutnya disingkat dengan **BPBD** adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
3. **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
4. **Cek Lapangan (*Ground Check*)** adalah mekanisme revisi garis maya yang dibuat pada peta berdasarkan perhitungan dan asumsi dengan kondisi sesungguhnya.
5. ***Geographic Information System***, selanjutnya disebut **GIS** adalah sistem untuk pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan atau manipulasi, analisis, dan penayangan data yang mana data tersebut secara spasial (keruangan) terkait dengan muka bumi.
6. **Indeks Kerugian Daerah** adalah jumlah infrastruktur yang berada dalam wilayah bencana.
7. **Indeks Penduduk Terpapar** adalah jumlah penduduk yang berada dalam wilayah yang diperkirakan terkena dampak bencana.
8. **Kajian Risiko Bencana** adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan kapasitas daerah.
9. **Kapasitas Daerah** adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan tingkat bahaya dan tingkat kerentanan daerah akibat bencana.

10. **Kerentanan** adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.
11. **Korban Bencana** adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
12. **Pemerintah Pusat** adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. **Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana** adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
14. **Peta** adalah kumpulan dari titik-titik, garis-garis, dan area-area yang didefinisikan oleh lokasinya dengan sistem koordinat tertentu dan oleh atribut non spasialnya.
15. **Peta Risiko Bencana** adalah peta yang menggambarkan tingkat risiko bencana suatu daerah secara visual berdasarkan Kajian Risiko Bencana suatu daerah.
16. **Rawan Bencana** adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
17. **Rencana Penanggulangan Bencana** adalah rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan daerah.
18. **Risiko Bencana** adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
19. **Skala Peta** adalah perbandingan jarak di peta dengan jarak sesungguhnya dengan satuan atau teknik tertentu.
20. **Tingkat Kerugian Daerah** adalah potensi kerugian yang

mungkin timbul akibat kehancuran fasilitas kritis, fasilitas umum dan rumah penduduk pada zona ketinggian tertentu akibat bencana.

21. **Tingkat Risiko** adalah perbandingan antara tingkat kerentanan daerah dengan kapasitas daerah untuk memperkecil tingkat kerentanan dan tingkat bahaya akibat bencana.

1.6 Sistematika Penulisan

Profil Kejadian Bencana Provinsi Sumsel tahun 2015-2020 disusun berdasarkan data dan kajian risiko bencana sebelumnya. Profil ini dimuat dalam Dokumen PKB Provinsi Sumsel tahun 2015-2020 dengan kerangka atau *outline* sebagai berikut.

Ringkasan Eksekutif

Ringkasan eksekutif memaparkan seluruh hasil pengkajian dalam bentuk rangkuman dari tingkat kejadian bencana suatu daerah. Selain itu, ringkasan ini juga memberikan gambaran umum berbagai rekomendasi kebijakan yang perlu diambil oleh suatu daerah untuk menekan risiko bencana di daerah tersebut di waktu yang akan datang.

Bab I Pendahuluan

Bagian Bab ini menekankan arti strategis dan pentingnya penyusunan profil kejadian bencana daerah. Penekanan perlu pengkajian profil bencana merupakan dasar untuk penataan dan perencanaan penanggulangan bencana yang matang, terarah dan terpadu dalam pelaksanaannya.

Bab II Kondisi Umum Wilayah

Memaparkan kondisi wilayah Provinsi Sumatera Selatan Secara Umum sebagai acuan justifikasi terhadap data kejadian bencana.

Bab III Sekilas Tentang BPBD Sumatera Selatan

Menggambarkan kondisi instansi BPBD Sumatera Selatan dengan data-data kuantitatif pengelolaan lembaga (terhadap system perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi). Data dan informasi pada bagian ini akan menjadi landasan penilaian kapasitas dan perencanaan pengembangan lembaga.

Bab IV Profil Kejadian Bencana

Menampilkan dan menguraikan data kejadian-kejadian bencana yang pernah terjadi di Sumatera Selatan berdasarkan jenis bencana dan daerah kabupaten/kota. Selain itu, data dijabarkan dari hasil interpretasi yang dihubungkan dengan kondisi wilayah.

Beberapa data disajikan secara spasial untuk memudahkan dalam justifikasi tatakelola.

Bab IV Rekomendasi

Bagian ini menguraikan rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana daerah sesuai dengan kapasitas tanggap dan penanggulangan yang telah dilakukan. Rekomendasi yang dijabarkan berupa rekomendasi kebijakan administratif dan rekomendasi kebijakan teknis.

Bab V Penutup

Penutup memberikan kesimpulan akhir terkait tingkat risiko bencana dan kebijakan yang direkomendasikan serta kemungkinan tindak lanjut dari dokumen yang sedang disusun.

1.7 Metodologi

Dokumen profil kejadian bencana Provinsi Sumatera Selatan disusun berdasarkan data kejadian bencana di Sumatera Selatan dari tahun 2015 sampai 2020 yang dibagi berdasarkan jenis kejadian dan wilayah kabupaten/kota. Kejadian bencana tersebut meliputi:

1. Banjir;
2. Puting beliung;
3. Banjir bandang;
4. Tanah longsor;
5. Kecelakaan kapal;
6. Kebakaran pemukiman;
7. Gempa bumi;
8. Kebakaran lahan dan hutan;
9. Pandemi covid-19

Data kejadian bencana di Sumatera Selatan kemudian dianalisis secara deskriptif. Kajian dilakukan dengan melakukan desk studi terhadap data dan informasi yang dianggap relevan untuk menggambarkan kondisi bencana di Sumatera Selatan. Data, dokumen dan informasi yang digunakan dikumpulkan dari berbagai sumber yang dianggap memiliki relevansi dan otoritas untuk mengeluarkan data, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai Musi, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas I Palembang, dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Sumatera Selatan. Guna mendukung dan memperkuat deskripsi bencana dilakukan wawancara mendalam terhadap para pihak yang dianggap perlu dan memiliki kompetensi untuk menjelaskan dan memberikan gambaran kondisi bencana di Sumatera Selatan.

BAB II. KONDISI UMUM WILAYAH

Sumatera merupakan pulau besar yang terbentuk dari hasil pergerakan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Aktivitas kedua lempeng tersebut membentuk suatu gugusan pegunungan yang memanjang dari utara sampai ke selatan Pulau Sumatera. Dengan morfologi yang terdiri dari pegunungan dan perbukitan, serta aktivitas lempeng dan iklim basah, memungkinkan terjadinya banyak bencana, seperti bencana longsor, gempa bumi, banjir bandang, dan lain-lain (Fransiska et al. 2017).

Setiap bahaya yang mengancam Provinsi Sumatera Selatan berkaitan dengan kondisi wilayah. Semakin tinggi kerentanan wilayah terhadap bencana, semakin besar potensi bahaya dan risiko dari bencana tersebut. Kerentanan wilayah tinggi yang tidak didukung oleh kapasitas yang baik dapat mempertinggi potensi bencana dengan dampak-dampak yang lebih besar. Besarnya dampak-dampak yang akibat bencana diperkuat dengan adanya catatan sejarah kejadian bencana Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu, diperlukan pemaparan terkait kondisi wilayah yang berpengaruh terhadap bencana serta bukti catatan sejarah kejadian bencana yang menyebabkan munculnya potensi bencana.

Profil ini menyajikan gambaran umum wilayah yang ditinjau dari beberapa aspek, yaitu aspek geografis, demografis, topografis, dan iklim serta Ekoregion, Hutan dan Sungai. Masing-masing aspek tersebut memiliki pengaruh terhadap kerentanan wilayah yang menyebabkan potensi terhadap bencana-bencana Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, melalui pengkajian dengan dasar masing-masing aspek tersebut memberikan gambaran untuk antisipasi langkah-langkah atau kebijakan untuk penanggulangan bencana.

2.1 Geografis

Sumatera Selatan merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 79 meter diatas permukaan laut. Secara astronomis, Provinsi Sumatera Selatan terletak antara 1’-4’ Lintang Selatan dan antara 102’-106’ Bujur Timur. Luas wilayah Sumatera Selatan berupa daratan seluas 91.592,43 km^2 yang terbagi atas 17 Kabupaten/Kota (seperti ditunjukkan pada Tabel 2) yang terdiri dari 13 kabupaten dan 4 kota. Kabupaten PALI merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Muara Enim, sedangkan

Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan wilayah hasil pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas. Daerah dengan luas terkecil berada di Kota Prabumulih (251,94 km^2) dan terbesar adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan luas 18.359,04 km^2.

Provinsi Sumatera Selatan ber ibukota di Kota Palembang. Kabupaten/kota yang memiliki jarak terjauh dengan Kota Palembang yaitu Kabupaten Empat Lawang dan Musi Rawas Utara dengan jarak lebih dari 300 km, sedangkan yang terdekat dengan Kota Palembang yaitu Kabupaten Ogan Ilir dan Banyuasin yang berjarak sekitar 40 km dari ibukota kabupaten. Berdasarkan posisi geografisnya, bagian darat Provinsi Sumatera Selatan memiliki batas-batas:

- Utara berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi
- Selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung
- Barat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu
- Timur berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung

2.2 Topografis

Secara topografi, wilayah Sumatra Selatan di Pantai Timur tanahnya terdiri dari rawa-rawa dan payau yang dipengaruhi oleh pasang surut. Vegetasinya berupa tumbuhan palmae dan kayu rawa (bakau). Sedikit makin ke barat merupakan dataran rendah yang luas. Lebih masuk kedalam wilayahnya semakin bergunung-gunung. Disana terdapat bukit barisan yang membelah Sumatera Selatan dan merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian 900-1.200 meter dari permukaan laut. Bukit barisan terdiri atas puncak Gunung Seminung (1.964 m), Gunung Dempo (3.159 m), Gunung Patah (1.107 m) dan Gunung Bengkuk (2.125 m). Disebelah Barat Bukit Barisan merupakan lereng. Provinsi Sumatera Selatan mempunyai beberapa sungai besar. Kebanyakan sungai-sungai itu bermata air dari Bukit Barisan, kecuali Sungai Mesuji, Sungai Lalan dan Sungai Banyuasin. Sungai yang bermata air dari Bukit Barisan dan bermuara ke Selat Bangka adalah Sungai Musi, sedangkan Sungai Ogan, Sungai Komering, Sungai Lematang, Sungai Kelingi, Sunga Lakitan, Sungai Rupit dan Sungai Rawas merupakan anak Sungai Musi.

Bagian daratan Sumatera Selatan yang terdiri dari dataran rendah dan tinggi serta pegunungan itu secara umum merupakan lahan yang potensial untuk tanaman perkebunan, pertanian dan hortikultura. Di kawasan ini terdapat perkebunan karet, kopi, teh, kulit manis, kelapa sawit, tanaman padi, sayur-mayur, aneka ragam buah-buahan dengan areal yang cukup luas.

TabeL 2. Karakteristik Geografis dan Demografis Daerah Sumatera Selatan tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km^2)	% terhadap Luas Provinsi	Ibukota	Jarak Jalan ke Ibukota (Km)	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jumlah (Unit)		Jumlah Pulau	Penduduk			
							Kec	Desa/ Kel		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Kepadatan
Kabupaten													
1	Ogan Komering Ulu (OKU)	4.797,06	5,24	Baturaja	201	70	13	157	0	187 779	180 086	367.865	76,69
2	Ogan Komering Ilir (OKI)	18.359,04	20,04	Kayu Agung	57	18	18	327	1	423 879	405 921	829.800	45,20
3	Muara Enim	7.383,90	8,06	Muara Enim	150	45	22	256	1	324 141	312 674	636.815	86,24
4	Lahat	5.311,74	5,80	Lahat	222	100	24	377	0	208 810	200 572	409.382	77,07
5	Musi Rawas	6.350,10	6,93	Muara Beliti	291	120	14	199	0	206 496	197 323	403.819	63,59
6	Musi Banyuasin	14.266,26	15,58	Sekayu	124	15	15	243	0	331 007	316 068	647.075	45,36
7	Banyuasin	11.832,99	12,92	Pangkalan Balai	44	63	21	305	21	435 531	419 097	854.628	72,22
8	OKU Selatan	5.493,94	6,00	Muara Dua	271	133	19	259	0	189 008	172 077	361.085	65,72
9	OKU Timur	3.370,00	3,68	Martapura	202	83	20	332	0	345 274	331 523	676.797	200,83
10	Ogan Ilir	2.666,09	2,91	Indralaya	40	25	16	241	0	215 919	214 176	430.095	161,32
11	Empat Lawang	2.256,44	2,46	Tebing Tinggi	303	90	10	156	0	127 306	122 903	250.209	110,89
12	Penukal Abab Lematang Ilir (Pali)	1.840,00	2,01	Talang Ubi	161	40	5	97	0	95 505	94 259	189.764	103,13
13	Muratara	6.008,55	5,56	Muara Rupit	357	40	7	89	0	96 726	95 473	192.199	31,99
Kota													
14	Palembang	369,22	0,40	Palembang	0	8	18	107	2	834 175	828 718	1.662.893	4.502,56
15	Prabumulih	251,94	0,28	Prabumulih	95	95	6	37	0	94 289	92 545	186.834	741,58
16	Pagar Alam	633,66	0,69	Pagar Alam	281	280	5	35	0	71 163	68 031	139.194	219,67
17	Lubuk Linggau	401,50	0,44	Taba Pingin	294	120	8	72	0	116 319	115 910	232.229	578,40
	Sumatera Selatan	**91.592,43**		**Palembang**	**-**	**-**	**241**	**3289**	**25**	**4.303.327**	**4.167.356**	**8.470.683**	**92,48**

Sumber: BPS Sumsel (2020)

2.3 Demografis

Penduduk Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2019 sebanyak 8.470.683 jiwa yang terdiri atas 4.303.327 jiwa penduduk laki-laki dan 4.167.356 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2010, penduduk Provinsi Sumatera Selatan mengalami pertumbuhan sebesar 1,39 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2019 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 103,26.

Kepadatan penduduk di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 mencapai 92,48 jiwa/km^2. Kepadatan Penduduk di 17 kabupaten/kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kota Palembang dengan kepadatan sebesar 4.502,56 jiwa/km^2 dan terendah di Ke Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 31,99 jiwa/km^2.

Pada tahun 2019 jumlah angkatan kerja di Sumatera Selatan sebanyak 4.154.417 orang. Perkembangan jumlah angkatan kerja mengalami peningkatan dari tahun 2018. Sementara untuk tingkat pengangguran Sumatera Selatan pada tahun 2019 sebesar 4,48 persen. Angka Pengangguran ini dihitung dengan mendefinisikan menganggur sebagai mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan dan sudah mendapat pekerjaan tetap tetapi belum mulai bekerja.

2.4 Iklim

Sumatera Selatan beriklim tropis yang hanya dipengaruhi dua musim sepanjang tahun, yakni musim hujan dan musim panas. Klasifikasi iklim berdasarkan suhu dan kelembaban udara dengan simbol A dan B. Iklim A atau Tropis artinya suhu rata-rata bulanan tidak kurang dari 18^{0}C, suhu rata-rata tahunan 20^{0}C-25^{0}C (Gambar 1.), Kelembaban rata-rata antara 85-100% (Gambar 2.), curah hujan rata-rata lebih dari 70 cm/ tahun. Iklim B atau iklim Gurun Tropis atau iklim kering dengan ciri terdapat di daerah gurun dan daerah semiand (steppa), curah hujan terendah kurang dari 25,4/ tahun dan penguapan besar. Musim hujan relatif jatuh pada bulan Oktober sampai April dengan curah hujan berkisar 2,100 mm sampai 3,264 mm. Musim panas atau kemarau biasanya dimulai bulan Juni sampai September setelah masa transisi bulan Mei.

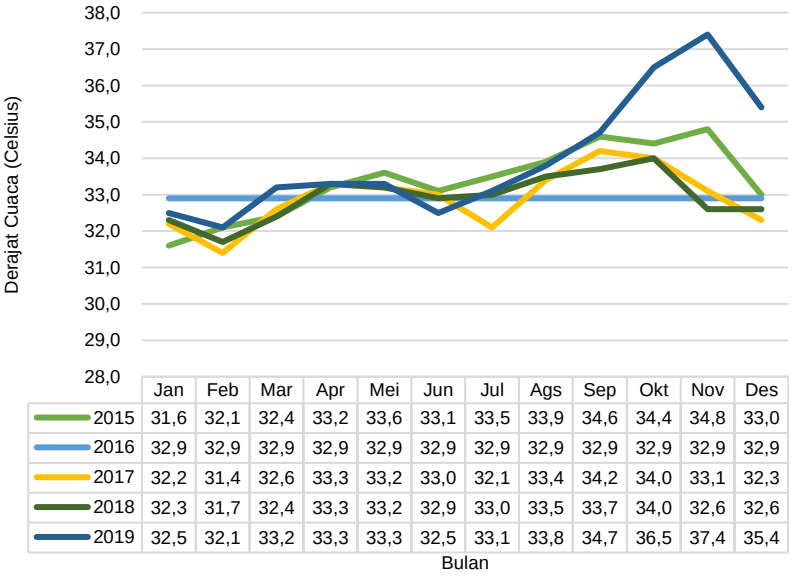

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
2015	31,6	32,1	32,4	33,2	33,6	33,1	33,5	33,9	34,6	34,4	34,8	33,0
2016	32,9	32,9	32,9	32,9	32,9	32,9	32,9	32,9	32,9	32,9	32,9	32,9
2017	32,2	31,4	32,6	33,3	33,2	33,0	32,1	33,4	34,2	34,0	33,1	32,3
2018	32,3	31,7	32,4	33,3	33,2	32,9	33,0	33,5	33,7	34,0	32,6	32,6
2019	32,5	32,1	33,2	33,3	33,3	32,5	33,1	33,8	34,7	36,5	37,4	35,4

Gambar 1. Iklim Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2019

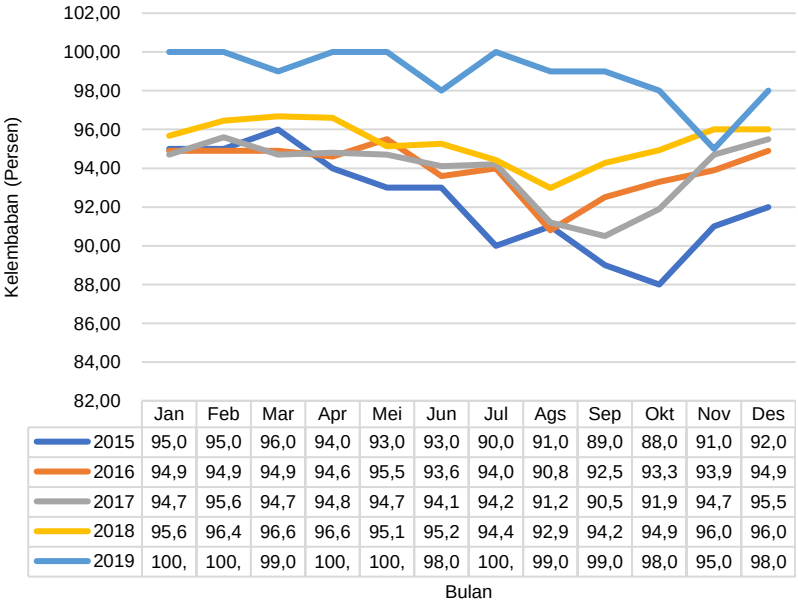

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
2015	95,0	95,0	96,0	94,0	93,0	93,0	90,0	91,0	89,0	88,0	91,0	92,0
2016	94,9	94,9	94,9	94,6	95,5	93,6	94,0	90,8	92,5	93,3	93,9	94,9
2017	94,7	95,6	94,7	94,8	94,7	94,1	94,2	91,2	90,5	91,9	94,7	95,5
2018	95,6	96,4	96,6	96,6	95,1	95,2	94,4	92,9	94,2	94,9	96,0	96,0
2019	100,	100,	99,0	100,	100,	98,0	100,	99,0	99,0	98,0	95,0	98,0

Gambar 2. Kelembaban Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2019

2.5 Ekoregion, Hutan dan Sungai

Sumatera Selatan didominasi oleh ekoregion Dataran Aluvial yang merupakan ekoregion terluas di Pulau Sumatera (sekitar 17,47% dari keseluruhan luas Pulau Sumatera). Total luasan Ekoregion Dataran Aluvial di Pulau Sumatera sebesar 8.302.423,63 hektar dan 2.129.659,89 hektar terdapat di provinsi ini. Secara umum, pesebaran ekoregion ini mengikuti daerah aliran sungai baik yang terletak di bagian barat maupun bagian timur Pulau Sumatera. Material utama penyusun ekoregion ini adalah endapan alluvium yang berlapis-lapis, yang terdiri dari material pasir, debu, dan lempung relatif seimbang. Komposisi endapan alluvium ini bervariasi, tergantung pada kondisi geologi di daerah hulu yang terbentuk akibat aktivitas pengendapan sediman aliran sungai, hasil erosi tanah di daerah hulu atau lereng atas. Material aluvium selanjutnya akan berkembang menjadi tanah aluvial (Suharyani et al. 2016).

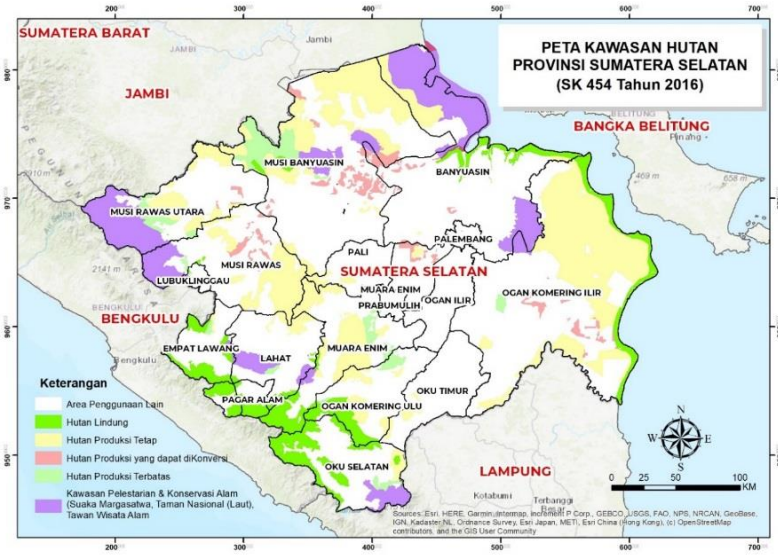

Gambar 3. Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan
Sumber: SK Menhut No. 454 Tahun 2016

Total daratan Sumatera Selatan ditafsir seluas ±8.742.517,61 hektar yang terdiri dari areal berhutan (hutan) seluas ± 1.116.572,42 hektar (13%) dan areal tidak berhutan (Non Hutan) seluas ± 7.576.957,90 hektar (87%)

(Dishut Sumsel 2020). Berdasarkan SK.454/MenLHK/Setjen/PLA.2/6/ 2016 Tanggal 17 Juni 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.866/Menhut-II/2014 Tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan (Gambar 3) maka Provinsi Sumatera Selatan memiliki kawasan hutan 3.457.858 hektar. Kawasan ini terbagi menjadi Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) seluas ± 790.785 Ha, Kawasan Hutan Lindung (HL), seluas ± 578.279, Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), seluas ± 213.918, Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas ± 1.713.880 hektar dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), seluas 160.996 hektar.

Daratan Sumatera Selatan (kawasan hutan dan area penggunaan lain) setiap tahunnya mengalami degradasi dan menjadi lahan kritis. Penetapan lahan kritis mengacu pada lahan yang telah sangat rusak karena kehilangan penutupan vegetasinya, sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sebagai penahan air, pengendali erosi, siklus hara, pengatur iklim mikro dan retensi karbon. Berdasarkan kondisi vegetasinya, kondisi lahan dapat diklasifikasikan sebagai: sangat kritis, kritis, potensial kritis, agak kritis, dan kondisi normal (tidak kritis). Seperti ditunjukkan pada Tabel 3. lahan kritis pada areal penggunaan lain lebih luas dibandingkan dalam kawasan hutan. Lahan kritis ini menyebar di semua kabupaten/kota. Terdapat 3 kabupaten yang memiliki lahan kritis terluas diantaranya Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir dan Banyuasin.

Tabel 3. Luas dan Penyebaran Lahan Kritis Sumatera Selatan

Kriteria Lahan Kritis	Areal Kawasan Hutan (Ha)	Areal Penggunaan Lain (Ha)
Tidak Kritis	442.135,60	798.421,24
Agak Kritis	1.403.644,71	2.695.233,93
Potensial Kritis	939.753,93	1.050.968,44
Kritis	244.472,87	343.332,65
Sangat Kritis	52.331,36	38.016,01

Sumber: BPDAS HL Musi, 2018

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu daratan yang merupakan suatu kesatuan ekosistem dengan sungai dan anak sungai yang melalui daerah tersebut, yang fungsinya untuk menampung air hujan dan sumber-sumber air lainnya, penyimpanan serta pengalirannya bermuara ke laut secara alamiah untuk kelestarian daerah tersebut. Kondisi DAS yang terganggu dapat mengakibatkan berbagai masalah

seperi limpasan tinggi, banjir genangan dan banjir bandang. Terdapat 16 DAS dan 40 Sub DAS di Provinsi Sumatera Selatan yaitu:

a. DAS Musi terdiri dari Sub DAS Rawas, Beliti, Ogan, Musi Hilir, Batanghari Leko, Kikim, Komering, Semangus, Musi Hulu, Lakitan dan Lematang. DAS Musi memiliki wilayah terluas yaitu 6.224.028,78 Ha
b. DAS Banyuasin terdiri dari Sub DAS Lalan, Banyuasin, dan Calik
c. DAS Benawang terdiri dari Sub DAS Sembilang dan Benawang
d. DAS Bulurarinding terdiri dari Sub DAS Jeruju, Lumpur, Lebong Hitam, Sugihan, Batang, dan Riding.
e. DAS Mesuji terdiri dari Mesuji Hulu, Mesuji Hilir dan Padang Mas Hitam.

BAB III. SEKILAS TENTANG BPBD PROVINSI SUMATERA SELATAN

3.1 Sejarah Singkat

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan bertugas dan bertanggung jawab dalam mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Pola penanggulangan bencana mendapatkan dimensi baru dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang di ikuti beberapa aturan pelaksana terkait yaitu Peraturan Presiden No. 08 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, dan PP No. 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana. Dimensi baru dari rangkaian peraturan terkait dengan bencana tersebut adalah:

a. Penanggulangan bencana sebagai sebuah upaya menyeluruh dan proaktif dimulai dari pengurangan risiko bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi dan rekonstruksi.
b. Penanggulangan bencana sebagai upaya yang dilakukan bersama oleh para pemangku kepentingan dengan peran dan fungsi yang saling melengkapi.
c. Penanggulangan bencana sebagai bagian dari proses pembangunan sehingga mewujudkan ketahanan *(resilience)* terhadap bencana.

Sebagai respon dari perubahan paradigma penanggulangan bencana tersebut maka diterbitkan Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana di dalam ketentuan umumnya disebutkan bahwa, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah

serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Selanjutnya ketiga upaya tadi disebut sebagai tahapan penanggulangan bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang Penanggulangan Bencana, mengemban tugas dan tanggung jawab mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Sejak terbentuknya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah secara optimal melakukan tugas pokok, fungsi serta perannya dalam penanggulangan bencana. Namun demikian, dalam berbagai upaya penanggulangan bencana, masih banyak yang perlu menjadi perhatian kearah perbaikan serta penyempurnaan dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana yang efektif dan efisien sesuai dengan peran yang diemban oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

3.2 Struktur, Tugas, Pokok dan Fungsi Organisasi

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 disebutkan bahwa tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah:

1. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangundangan;
3. Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
5. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
8. Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota

Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan menjalankan:

1. Koordinasi penanggulangan bencana;

Koordinasi penanggulangan bencana dilaksanakan melalui dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap prabencana dan pascabencana. Pelaksanaan koordinasi tersebut salah satunya adalah penetapan kebijakan yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. dalam kondisi tanggap darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan menjalankan fungsi komando.

2. Komando penanggulangan bencana

Komando dalam rangka penanganan kedaruratan di wilayah yang terkena bencana melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan instansi terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. Fungsi yang terakhir adalah peran pelaksana.

3. Pelaksana penanggulangan bencana.

Pelaksana, terkait dengan kondisi pasca bencana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana; kebjakan pembangunan nasional, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2007 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan seperti ditunjukkan pada Gambar 4.

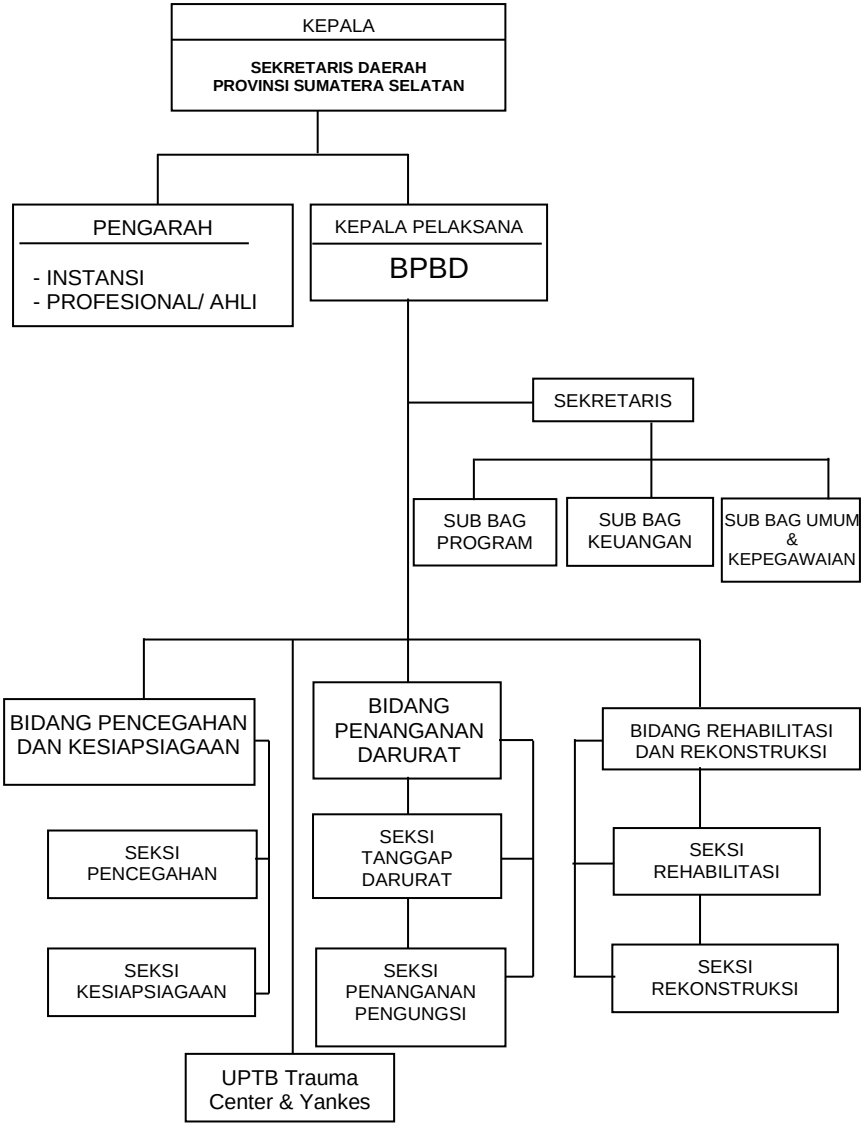

Gambar 4. Struktur Organisasi BPBD Sumatera Selatan

3.3 Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya BPBD Prov. Sumsel didukung oleh sumberdaya manusia sebanyak 150 orang terdiri dari 69 orang PNS (detail terlihat di Tabel 4) dan 80 orang TKS dengan rincian:

1. Pejabat Struktural : 16 orang
2. Pejabat Fungsional Tertentu : 31 orang
3. Pejabat Fungsional Pelaksana : 22 orang
4. Pegawai TKS/SATGAS dengan SPK : 80 orang

Tabel 4. Data SDM PNS BPBD Prov. Sumsel Tahun 2019

No.	Uraian		Jumlah
1.	Jabatan Struktural	Esselon II	1
		Esselon III	5
		Esselon IV	10
2	Pejabat yang sudah memenuhi persyaratan kepangkatan	Esselon II	1
		Esselon III	5
		Esselon IV	10
	Pejabat yang belum memenuhi persyaratan kepangkatan	Esselon II	0
		Esselon III	0
		Esselon IV	0
3	Pejabat Struktural yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Struktural	Esselon II	0
		Esselon III	3
		Esselon IV	4
	Pejabat Struktural yang belum mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Struktural	Esselon II	1
		Esselon III	2
		Esselon IV	6
4	Jabatan Fungsional	Kesehatan	31
5	Staf		22
6	Usia	Usia dibawah 30 Tahun	0
		Usia diatas 30-40 Tahun	18
		Usia diatas 41-50 Tahun	25
		Usia diatas 50 Tahun	26
7	Pendidikan	Strata 2	15
		Strata 1	31
		Sarjana Muda	10
		SMA	13
		SMP	1
		SD	0
8	Jenis Kelamin	Laki-laki	28
		Perempuan	41
9	Golongan / Ruang	Golongan VI	9
		Golongan III	52
		Golongan II	8
		Golongan I	0

3.4 Sarana dan Prasarana

Selain didukung oleh sumber daya manusia, Badan Penanggulangan Bencana juga didukung oleh sarana dan prasarana yang ditunjukkan pada Tabel 4-8.

Tabel 5. Sarana Dan Prasarana BPBD Provinsi Sumatera Selatan

NO	Bangunan Utama
1	Ruang Administrasi
2	Ruang Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumsel
3	Ruang Sekretaris BPBD
4	Ruang Kasubbag. Program dan Kasubbag. Umum dan Kepeg.
5	Ruang Bendahara Keuangan
6	Ruang Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiap Siagaan
7	Ruang Kasi Pencegahan dan Kasi. Kesiapsiagaan
8	Ruang Kepala Bidang Penanganan Darurat
9	Ruang Kasi Tanggap Darurat dan Kasi. Penanganan Pengungsi
10	Ruang Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
11	Ruang Kasi. Rehabilitasi dan Kasi. Rekonstruksi
12	Ruang UPTB Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan
13	Ruang AULA
14	Ruang Rapat
15	Gudang Peralatan
16	Gudang Logistik
17	Ruang PUSDALOPS
18	Ruang Koperasi Siaga
19	Musollah Alfatimah
20	Kantin Sehat BPBD
21	Pos Jaga

Tabel 6. Data Peralatan BPBD Provinsi Sumatera Selatan

No	Data Peralatan	No	Data Peralatan
1	Tenda Pleton	24	Valbed
2	Mesin Perahu UK 15 PK	25	HT
3	Lampu Badai	26	RIG
4	Jenset	27	SSB
5	Light Tower Portable	28	Lampu Senter HID Search Light
6	Tenda Posko	29	Genset 1,2 KW
7	Tenda Pleton	30	Genset 10 KVA
8	Tenda Keluarga	31	Genset 5 KVA
9	Lampu Senter	32	Gergaji mesin/Chansaw
10	Mesin Pompa Air	33	Mesin Pompa Air Apung Honda WB 20 XH
11	Valbet	34	Mesin Pompa Air FJ 180 V
12	Perlengakapan TRC	35	Water Treatment Portable
13	Terpal Gulung Plastik	36	Water Treatment Portable Mini
14	Water Treatment Portable	37	Perahu Karet Uk. 10 Org
15	Fleksibel Tank 1000 liter	38	Mesin Perahu Kap. 40 PK
16	Fleksibel Tank 2000 liter	39	Matras
17	Mesin Perahu Karet Kap 25 PK	40	Pompa Portable, Shibaura TF 745 M
18	Mesin Perahu Karet Kap 30 PK	41	Pompa Portable, Shibaura TF 516 M
19	Tenda Posko	42	Pompa Apung
20	Tenda Pengungsi	43	Tenda Keluarga

No	Data Peralatan	No	Data Peralatan
21	Lampu Penerangan (Solar Cell)	44	Alas/ Matras
22	Tenda Keluarga	45	Lampu
23	Solar Handle Lamp	46	Valbed

Tabel 7. Data Logistik BPBD Provinsi Sumatera Selatan

No	Data Logistik
1	Paket Lauk Pauk
2	Makanan Tambahan Gizi
3	Paket Sandang
4	Kids Ware
5	Masker
6	Paket Seragam Laki-laki
7	Paket Seragam Perempuan
8	Karung Plastik
9	Paket Kesehatan Keluarga

Tabel 8. Data Kendaraan Operasional BPBD Provinsi Sumatera Selatan

No	Jenis kendaraan	Type/merk		Tahun Pembelian	Jumlah	Kondisi
1	Mobil	Mini Bus	Ford/New Everest 2.5XLT	2010	1	Baik
2	Mini Bus	Suzuki	APV GL	2010	1	Baik
3	Mini Bus	Daihatsu	Luxio	2012	1	Baik
4	Mobil Jeep	Ford	Escape	2006	1	Baik
5	Pick Up Single Kabin	Ford	Rangers	2010	1	Baik
6	Ambulance	Mazda	BT 50 RE 6 CAB 4 X 4.2.5 MT	2007	1	Baik
7	Sepeda Motor	Suzuki	FD.125 XSD	2007	1	Baik
8	Chevrolet	Corolado LTZ		2012	1	Baik
9	Sepeda Motor	Suzuki	UK 125 SC A/T	2010	1	Baik
10	Mobil Tangki Air	Isuzu	NKR 71 E2	2007	1	Baik
11	Mini Bus	KIA	Karnival AI	2002	1	Baik
12	Sepeda Motor	Suzuki	FD.125 XSD	2007	1	Baik
13	Ampibi Loreng				1	Baik

Tabel 9. Kendaraan Operasional Bantuan dari BNPB

No	Jenis kendaraan	Type/merk/bahan/warna		Tahun Pembelian	Jumlah	Kondisi
1	Mobil Tangki Air	Isuzu	NKR 71 E2	2007	1	Baik
2	Mobil Double Kabin PU	Mitsubishi	STRCR2.5A DCGLSMT	2010	1	Baik
3	Mobil Dapur Umum	Mitsubishi	C.DISFE74H DVAX2 MT	2010	1	Baik
4	Mobil Pengelolah Air	Isuzu	MKR 71HD E2	2010	1	Baik
5	Motor Trail	Kawasaki	LX.150 C /KLX150S	2010	1	Baik

No	Jenis kendaraan	Type/merk/bahan/warna		Tahun Pembelian	Jumlah	Kondisi
6	Motor Trail	Kawasaki	LX.150 C (KLX150S)	2010	1	Baik
7	Rescue Komado	Mitsubishi	STRACR25AGELS	2011	1	Baik
8	Ambulance	Isuzu	NKR 5510 E2-1	2011	1	Baik
9	Truk Serba Guna	Isuzu	NKR 71 HDE 21	2011	1	Baik
10	Speed boat polyethelene				1	Baik

3.5 Keberadaan SOP

Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2014 terdapat 5 (lima) *Standar Operating procedure* (SOP) yaitu:

1. SOP tentang Sekretariatan
2. SOP tentang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
3. SOP tentang Tanggap Darurat
4. SOP tentang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
5. SOP tentang Pelayanan Kesehatan dan Pengobatan Trauma Center

3.6 Program, Layanan dan Pendanaan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan memiliki beberapa layanan yaitu Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, Layanan Tanggap Darurat Bencana, Layanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, Layanan Kesehatan Korban Bencana dan Layanan Pusdalops PB.

3.6.1 Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

Gambaran kinerja pelayanan SKPD pada bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana. Selanjutnya disajikan dalam Tabel 9. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana merupakan tanggung jawab yang di emban oleh BPBD Prov. Sumsel ini merupakan bagian dari pemenuhan hak-hak dasar warga negara Indonesia. Pada tahun 2015 di Provinsi Sumatera Selatan terjadai bencana asap yang sangat hebat tercatat lebih kurang 27.043 Hotspot, kejadian ini menyebabkan terganggunya aktivitas dan derajat kesehatan masyarakat. Upaya-upaya pencegahan terjadinya Karhutla dilakukan juga dengan sosialisasi didaerah yang rawan terjadi karhutla diantaranya BPBD telah melakukan sosialisasi di berbagai Kecamatan di beberapa kabupaten/kota di Sumsel.

Tabel 10. Tingkat capaian Kinerja pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

No	Indiktor Kinerja	Capaian Kinerja
1.	Pencegahan Bencana	Mengurangi kerusakan sarana dan prasarana, lingkungan hidup, kerugian harta benda dan korban jiwa
2.	Kesiapsiagaan menghadapi bencana	Meningkatkan kemampuan petugas dan masyarakat menghadapi bencana.

3.6.2 Layanan Tanggap Darurat Bencana

Layanan Tanggap darurat bencana dilakukan kepada masyarakat korban bencana dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan prasarana dan sarana. (Definisi dari Perka BNPB No.9 tahun 2008)

Pada saat tanggap darurat situasi panik sering terjadi karena bencana datang secara tiba-tiba, waktu yang sangat singkat, kebutuhan yang mendesak ini menjadikan sulit berkoordinasi karena banyaknya institusi yang terlibat dalam penanganan darurat bencana dan kompetisi dalam pengerahan sumberdaya. Oleh karena itu perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif dalam rangka memperlancar penyelenggaraan penanganan darurat bencana. Tim Reaksi Cepat BPBD adalah tim yang ditugaskan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana, serta memberikan dukungan pendampingan dalam rangka penanganan darurat bencana. Tim Reaksi Cepat (TRC) ini yang terdiri dari berbagai instansi/institusi yang bekerja berdasarkan prosedur tetap Tim Reaksi Cepat.

Ada 2 tugas pokok dalam layanan Tanggap Darurat Bencana yaitu melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana yang meliputi:

1) Penilaian kebutuhan (*needs assessment*) dan, Penilaian kerusakan /kerugian (*damage and losses assessment*); **Penilaian kebutuhan (*needs assessment*)** menentukan jumlah dan jenis bantuan yang diperlukan dalam upaya penyelamatan korban bencanan meliputi: SAR, bantuan medis, penyediaan pangan,

penyiapan penampungan sementara, penyediaan air bersih serta sanitasi; dan **Penilaian kerusakan /kerugian (*damage and losses assessment*)** pengumpulan data primer dan sekunder tentang jenis, waktu, lokasi dan penyebab bencana serta kondisi mutakhir (korban, kerusakan dan kerugian serta dampak bencana).

2) Memberikan dukungan pendampingan (membantu Satlak PB/BPBD Kabupaten/Kota) dalam penanganan darurat bencana.

Sebagai contoh pelayanan tanggap darurat yang telah dilakukan oleh BPBD saat terjadi karhutla di Prov. Sumsel adalah pemadaman darat dan udara, pemadaman darat dilakukan oleh satgas dari berbagai lembga TNI, POLRI, Mangga Agni, masyarakat dan instan terkait. Pemadaman udara dilakukan dengan water bombing berasal dari bantuan berbagai pihak. Realisasi water bombing tahun 2015 seperti ditunjukkan pada Gambar 5.

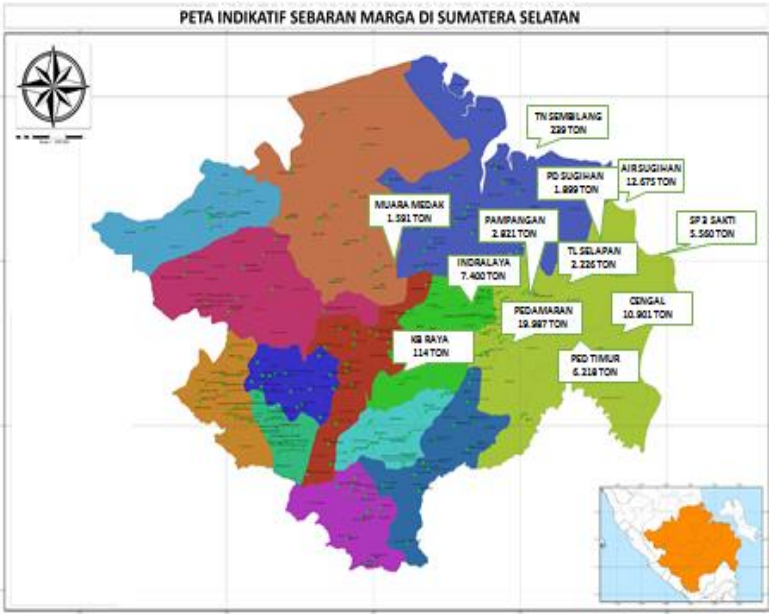

Gambar 5. Peta Realisasi Water Bombing

Pelayanan yang dilakukan oleh BPBD Prov/Kab/Kota tentu dirasakan langsung oleh masyarakat dan dinilai oleh Lembaga Pemerintah. Atas keberhasilan kinerja BPBD dalam menangani bencana di Prov. Sumsel ada beberapa pialah dan penghargaan yang

diterimah oleh BPBD Provinsi Sumatera Selatan, dokumen penghargaan-penghargaan terlampir.

3.6.3 Layanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana (Perka BNPB No. 17/ 2010).

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat (Perka BNPB Nomor 17 Tahun 2010).

Ruang lingkup pelaksanaan Rehabilitasi Pascabencana dilakukakan melalui kegiatan: perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan social psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi konflik, pemulihan social, ekonomi dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan, dan pemulihan fungsi pelayanan publik (Pasal 56, PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana).

Rekonstruksi pada wilayah pasca bencana dilakukan melalui kegiatan:

1) Pembangunan kembali prasarana dan sarana;
2) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
3) Pembangunan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
4) Penerapan rancang bangun yang tepat dan pembangunan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
5) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
6) Peningkatan kondisi social, ekonomi dan budaya;
7) Peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
8) peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat. (Pasal 75, PP No. 21/2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana).

Pada layanan rekonstruksi pasca bencana, diarahkan untuk terlebih dahulu melakukan Inventarisasi dan Identifikasi Kerugian/ Kerusakan (*Damage and Loss assessment/DLA*) secara lengkap, kemudian dilakukan kajian kebutuhan (*Post Disaster Need Assessment/*

PDNA) yang menggunakan informasi dari DLA serta memasukkan unsur-unsur pengurangan resiko bencana (pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan), dan melibatkan berbagai unsur masyarakat sejak dari awal.

3.6.4 Layanan Kesehatan Korban Bencana

Korban bencana, baik secara individu maupun berkelompok, terutama untuk kelompok rentan, dapat memperoleh bantuan pelayanan kesehatan Bantuan pelayanan kesehatan diberikan dalam bentuk:

1) Pelayanan kesehatan umum meliputi: Pelayanan kesehatan dasar dan Pelayanan kesehatan klinis.
2) Pengendalian penyakit menular meliputi: Pencegahan Umum; Pencegahan Campak; Diagnosis dan Pengelolaan Kasus; Kesiapsiagaan Kejadian Luar Biasa; Deteksi KLB, Penyelidikan & Tanggap
3) HIV/AIDS (Perka BNPB Nomor 7 tahun 2008 tentang Tata cara Pemberian Bantuan Pelayanan Kesehatan)

Pelayanan Kesehatan yang ditujukan untuk membantu masyarakat terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kesehatan masyarakat korban bencana. Kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat terkena dampak bencana sebagaimana dimaksud dilakukan melalui upaya-upaya:

1) Membantu perawatan lanjut korban bencana yang sakit dan mengalami luka;
2) Membantu perawatan korban bencana yang meninggal;
3) Menyediakan obat-obatan;
4) Menyediakan peralatan kesehatan;
5) Menyediakan tenaga medis dan paramedis, dan
6) Merujuk ke rumah sakit terdekat (Pasal 69, PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana).

Layanan Kesehatan bagi korban bencana dilaksanakan oleh UPTB Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan yang merupakan satu diantara bentuk pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada masyarakat. Berdasarkan SK Nomor 658/KPTS/BPBD/2010 tertanggal 28 September 2010 sebagai Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan dengan nomor 4 tahun 2011 tentang Pembentukan UPTB BPBD Prov. Sumatera Selatan, yang

dipimpin oleh seorang Kepala Unit dan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.

UPTB TC & PK bertugas melaksanakan pelayanan kesehatan baik secara promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif baik pada saat pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana. UPTB TC & PK hadir untuk membantu para korban bencana sehingga diharapkan akan mepercepat proses pemulihan psikis para korban bencana yang dibangun atas dasar konsep resiliensi manusia dan disaster mental health. Pada layanan ini tersedia sumberdaya manusia berupa tenaga-tenaga fungsional seperti dokter, dokter gigi, apoteker, Psikolog Klinis, Bidan, Perawat, perawat gigi, Nutrisionis, Pranata Laboratorium Kesehatan, Radiografer, Sanitarian dan Penyuluh Kesehatan Masyarakat.

3.6.5 Layanan Pusdalops PB

Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) yang disingkat Pusdalops adalah unsur pelaksana BNPB/BPBD yang bertugas menyelenggarakan system informasi dan komunikasi penanggulangan bencana.

Pemantauan kondisi alam dan aktivitas terhadap potensi bencana pada daerah-daerah yang memiliki risiko tinggi perlu dilakukan terus menerus. Informasi terkait bencana perlu dikumpulkan, diproses, dianalisis dan selanjutnya disusun laporan serta deseminasinya. Informasi bencana disini tidak hanya menyangkut kejadian bencana, namun juga upaya penanganan yang dilakukan oleh berbagai pihak baik saat pra bencana sampai pasca bencana. Pada proses ini, perlu adanya Pusdalops PB yang mampu mengelola informasi hingga menyebarluaskan kepada pejabat berwenang maupun masyarakat melalui media. Pusdalops PB memegang kuat prinsip: cepat, tepat, akurat, koordinatif, kooperatif, transparansi dan akuntabel.

3.7 Pendanaan

Pendanaan di BPBD Sumatera Selatan berasal dari APBD, ABPN dan hibah lainnya. Pada Tabel 10 menunjukkan realisasi anggaran tahun 2015-2020 menurut jenis belanja pada BPBD Sumatera Selatan yang berasal dari APBD. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa anggaran belanja setiap tahunnya mengalami fluktuasi, namun secara umum mengalami peningkatan. Anggaran ini tidak dapat merepresentasikan kondisi riil pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana mengingat adanya kondisi darurat bencana pada tahun-tahun tertentu yag

mempengaruhi adanya pelaksanaan kegiatan dengan dana yang berasal dari APBN atau hibah lainnya.

Tabel 11. Realisasi Anggaran Tahun 2015-2020 Menurut Jenis Belanja pada BPBD Sumatera Selatan

Uraian	Realisasi Anggaran					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS, dll) (A)	**7.238.997.472**	**6.280.453.866**	**4.724.249.976**	**7.160.577.029**	**7.813.696.000**	**8.946.536.000**
Belanja Langsung (B=C+D+E+F+G+H+I)	**8.114.000.355**	**14.991.641.425**	**6.018.081.813**	**8.588.677.550**	**12.994.986.392**	**20.731.659.000**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (C)	4.874.248.375	4.196.045.321	3.582.535.078	3.437.411.000	3.630.924.163	3.255.518.700
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (D)	624.772.200	242.218.065	119.909.300	289.788.100	4.293.488.261	961.162.300
Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana (E)	1.554.081.475	153.290.000	1.228.839.000	3.348.329.700	3.331.648.150	6.671.277.000
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana (F)	189.977.000	29.989.200	747.942.600	1.419.092.700	1.049.994.820	1.065.840.000
Program Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (G)	-	10.287.460.000	338.855.835	47.207.800	326.026.752	8.321.659.000
Program Peningkatan Balai Pengobatan Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan (H)	186.051.205	29.413.839		21.938.250	59.771.624	134.078.000
Program Spesifik/Khas setiap tahunnya (I)	684.870.100	53.225.000		24.910.000	303.132.622	322.124.000
TOTAL (A+B)	**15.352.997.827**	**21.272.095.291**	**10.742.331.789**	**15.749.254.579**	**20.808.682.392**	**29.678.195.000**

3.8 Capaian Prestasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kinerjanya dilaksanakan dengan sungguh-sungguh terbukti ada banyak prestasi yang telah dicapai dalam penanggulangan bencana yaitu:

1. Penghargaan yang telah diterima dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Keberhasilan di bidang Kebencanaan di Provinsi Sumatera Selatan diapresiasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana dengan memberikan ***Certificate of Achievement*** kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa **"BNPB Awards"** sebagai BPBD Terbaik Tingkat Provinsi se-Indonesia untuk kategori:

- Juara I kategori Pra Bencana Tingkat Nasional tahun 2012.
- Juara III kategori Tanggap Darurat Tingkat Nasional tahun 2012.
- Juara Umum kategori BPBD Provinsi Terbaik Tingkat Nasional 2012.
- Juara II kategori Logistik dan Peralatan Tingkat Nasional tahun 2012.
- Juara I kategori Rehabilitasi dan Rekontruksi Tingkat Nasional BPBD tahun 2013.
- Juara II kategori Akuntabilitas Tingkat Nasional BPBD tahun 2013.
- Juara III kategori Logistik dan Peralatan tahun 2014.
- Juara III kategori Perencanaan, Keuangan, dan Kelembagaan tahun 2014.
- Juara I kategori Akuntabilitas tahun 2014.
- Penghargaan dan ucapan terima kasih sebagai pembicara dalam training *psychology first aid*, topik *"Usir Traumatik Paska Bencana di UIN Raden Patah"* tahun 2015.
- Juara III Penganugerahan sebagai BPBD Provinsi Terbaik Wilayah (Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera) tahun 2016.
- Penghargaan untuk Pelatihan Penguatan Kapasitas LPB PWM Sumsel dan Kaji Kebutuhan dalam Tanggap Darurat tahun 2016.
- Penghargaan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI atas kerjasama dalam aksi pengendaliaan kebakaran hutan dan lahan melalui operasi pencegahan, patroli terpadu, deteksi dini, pelaporan pemantauan, pemadaman dan penanganan paska kebakaran hutan dan lahan semester I tahun 2016.
- Juara Umum kategori Pengelolaan Data Bencana Se-Tingkat Provinsi 2016

- **Penganugerahan "BNPB Awards"** sebagai BPBD Provinsi Terbaik wilayah II se-Indonesia Tahun 2017
- Penganugerahan BPBD Provinsi Terbaik I Wilayah 3 tahun 2018

2. Penghargaan yang diterima dari Gubernur Sumatera Selatan Kategori Kebersihan Kantor di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
   - Juara Harapan II Lomba Kebersihan Kantor HUT RI Ke-65 tahun 2010
   - Juara I Lomba Kebersihan Kantor HUT RI Ke-66 tahun 2011
   - Juara Harapan I Lomba Kebersihan Kantor HUT RI Ke-67 tahun 2012
   - Juara I Lomba Kebersihan Kantor HUT RI Ke-68 tahun 2013
   - Juara II Kebersihan Kantor HUT RI ke-69 tahun 2014
   - Juara I Kebersihan Kantor HUT RI ke-70 tahun 2015
   - Juara III Kebersihan Kantor HUT RI ke-71 tahun 2016

BAB IV. KEJADIAN BENCANA

Masing-masing potensi bencana di Provinsi Sumatera Selatan diperkirakan berdasarkan perhitungan sejarah kejadian bencana dari Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dan kemungkinan terjadi bencana yang diketahui dari kondisi daerah melalui pengkajian risiko bencana Provinsi Sumatera Selatan. Secara Geografis, wilayah Provinsi Sumatera Selatan berbatasan langsung dengan patahan sumatera, hal ini juga menyebabkan di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera selatan memiliki ancaman gempabumi. Selain itu, kondisi topografi yang terdiri dari dataran rendah, gambut, sungai besar, perbukitan membuat Provinsi Sumatera Selatan memiliki ancaman bencana yang bervariasi. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2018 pada Gambar 6, Provinsi Sumatera Selatan memiliki indeks risiko 139.67 (sedang). Tabel 11 menyajikan beberapa potensi bencana di Provinsi Sumatera Selatan beserta kelas resikonya.

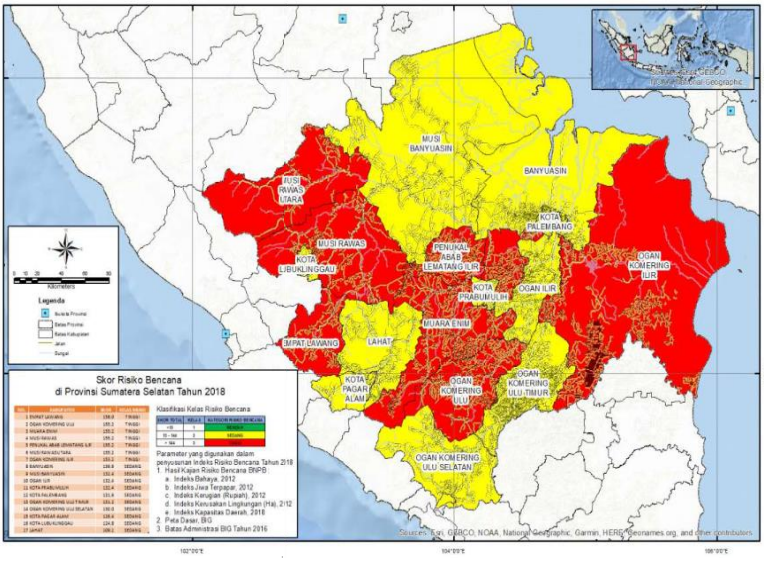

Gambar 6. Peta Indeks Risiko Bencana Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018
Sumber: IRBI 2018 (BNPB, 2018)

Tabel 12. Potensi Kelas Bahaya Bencana Provinsi Sumatera Selatan

No	Kabupaten/ Kota	Kelas Bahaya										
		Banjir	Banjir Bandang	Cuaca Ekstrim	Wabah Penyakit	Gel. Ektrim & Abrasi	Gempa Bumi	Karhutlah	Kegagalan Teknologi	Kekeringn	Letusan Gunung Dempo	Tanah Longsor
1	Ogan Komering Ulu	Sedang	Tinggi	Sedang	Rendah		Rendah	Sedang		Tinggi		Tinggi
2	Ogan Komering Ilir	Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang	Rendah	Tinggi		Tinggi		
3	Muara Enim	Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah		Sedang	Tinggi		Tinggi		Tinggi
4	Lahat	Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah		Tinggi	Sedang		Tinggi	Sedang	Tinggi
5	Musi Rawas	Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah		Sedang	Tinggi		Tinggi		Tinggi
6	Musi Banyuasin	Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah		Rendah	Tinggi		Tinggi		Sedang
7	Banyuasin	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	Rendah	Tinggi	Tinggi	Tinggi		
8	OKU Selatan	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi		Tinggi	Tinggi		Tinggi		Tinggi
9	OKU Timur	Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah		Rendah	Sedang		Tinggi		Sedang
10	Ogan Ilir	Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah		Rendah	Tinggi	Tinggi	Tinggi		
11	Empat Lawang	Tinggi	Tinggi	Sedang			Tinggi	Tinggi		Tinggi	Sedang	Tinggi
12	PALI	Sedang	Tinggi	Sedang	Rendah		Rendah	Tinggi		Tinggi		
13	Musi Rawas Utara	Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah		Sedang	Tinggi		Sedang		Tinggi
14	Palembang	Tinggi		Tinggi			Rendah	Tinggi	Tinggi	Sedang		
15	Prabumulih	Rendah	Tinggi	Sedang			Rendah	Sedang		Tinggi		
16	Pagar Alam	Sedang	Tinggi	Sedang	Rendah		Sedang	Sedang		Sedang	Rendah	Tinggi
17	Lubuklinggau	Sedang		Sedang	Rendah		Sedang	Sedang		Sedang		Sedang
Sumatera Selatan		Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi

Sumber: KRB 2015

4.1 Data Kejadian Bencana Berdasarkan Jenis Bencana

Beberapa bencana tercatat dalam sejarah kejadian bencana yaitu banjir, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi, gempabumi, tsunami, kegagalan teknologi, kekeringan, epidemi dan wabah penyakit, letusan gunungapi, cuaca ekstrim, tanah longsor, dan kebakaran hutan dan lahan. Ini menunjukkan bahwa terdapat 11 bencana berpotensi di Provinsi Sumatera Selatan yang membutuhkan penanganan untuk pengurangan risiko masing-masing bencana.

4.1.1 Banjir

Banjir adalah terbenamnya daratan karena peningkatan volume air akibat hujan deras, luapan air sungai atau pecahnya bendungan. Banjir bisa disebabkan karena penyumbatan saluran air akibat sampah yang dibuang oleh manusia disembarang tempat. Banjir juga dapat terjadi di daerah yang gersang dengan daya serap tanah terhadap air yang buruk atau jumlah curah hujan melebihi kapasitas serapan air. Selain itu, banjir dapat terjadi akibat kurangnya daya serap air karena pengalihan penggunaan lahan.

Angka kejadian banjir tertinggi berada di Sumatera Selatan seperti Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara dan OKU (Gambar 7). Banjir hakekatnya merupakan salah satu kondisi hidrologi hasil luaran dari suatu DAS yang juga menjadi karakteristik DAS tersebut. Kejadian banjir di wilayah Kab. Musi Banyuasin secara berulang terjadi tiap tahun spesifik berada pada DAS Musi yang melintas dari Provinsi Bengkulu, Jambi, Sumsel dan Provinsi Lampung dengan luas 7.760.222,86 Ha. Beberapa Sub DAS yang rentan banjir adalah Sub DAS Komering dan Sub DAS Deras, hal tersebut karena sifat alamiahnya. Sedangkan Sub DAS Ogan dan Sub DAS Musi Hulu merupakan dua sub DAS pemasok air banjir. Bila Sub DAS Ogan dikarenakan potensi curah hujan yang tinggi sedangkan Sub DAS Musi Hulu dikarenakan tingkat kerentanan lahan yang tinggi.

Banjir di Musi Rawas dan Musi Rawas Utara berkaitan dengan topografi dan kondisi DAS Rawas. Diketahui Sungai Rawas memiliki Panjang 2.485 km dengan anak-anak sungai: S. Rupit, S. Liam, S. Lumpang, S. Kemang, S. Kulus, S. Kutu, S. Mengkulam (BPS Sumsel, 2020). Saat ini kondisi tutupan lahan didominasi berupa perkebunan campuran dan hutan lindung. Banyaknya anak-anak sungai dan luasnya wilayah DAS Rupit dan DAS Musi, ditambah curah hujan rata-rata tahunan di daerah Musi adalah 2579 mm.

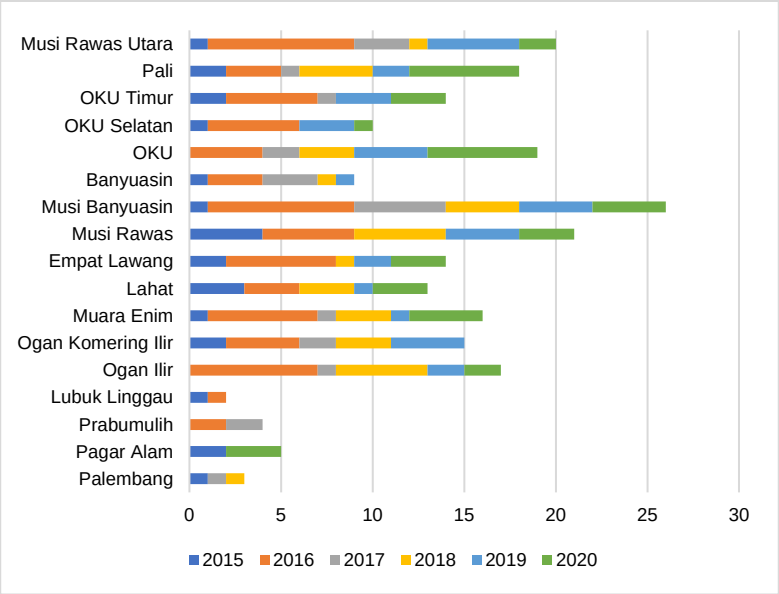

Gambar 7. Kejadian Bencana Banjir Tahun 2015-2020

4.1.2 Puting Beliung

Angin puting beliung adalah angin kencang yang datang secara tiba-tiba yang mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit). Bencana angin puting beliung paling banyak terjadi di Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten PALI, Kabupaten Musi Rawas, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Berikut ini data kejadian bencana angin puting beliung yang terjadi di Sumatera Selatan pada periode waktu 2015-2020 Gambar 8).

Kejadian putting beliung terjadi berulang karena ekspos matahari terhadap wilayah terbuka. Peningkatan suhu pada wilayah tersebut membuat terjadinya perbedaan suhu pada wilayah sekitar yang membuat terjadinya pertukaran udara secara kuat sehingga terbentuk angin putting beliung. Kejadian putting beliung sering terjadi pada wilayah perkebunan, wilayah terbuka, dan hamparan rawa yang banyak terdapat di Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten PALI, Kabupaten Musi Rawas, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Bencana putting beliung juga terjadi akibat rusaknya kondisi

ekosistem dan hilangnya tegakan pohon pada hamparan rawa dan padang rumput yang berguna untuk menurunkan suhu akibat penetrasi sinar matahari.

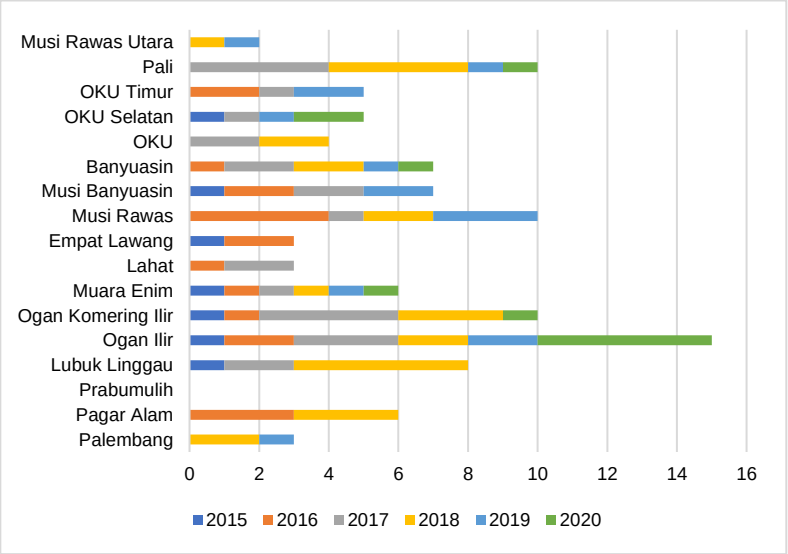

Gambar 8. Kejadian Bencana Puting Beliung Tahun 2015-2020

4.1.3 Banjir Bandang

Banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar yang disebabkan terbendungnya aliran sungai pada alur sungai. Faktor utama banjir bandang adalah dipicu oleh intensitas hujan ekstrim. Kemudian berhubungan dengan kejadian longsor yang menyumbat aliran sungai membentuk bendung alam. Selanjutnya tekanan aliran sungai menjebol bendung alami tersebut sehingga terjadi banjir bandang yang ditandai dengan kecepatan aliran yang tinggi dengan membawa lumpur, kayu, dan batu.

Potensi bahaya banjir bandang di seluruh kabupaten/kota di Sumsel masuk dalam kelas “tinggi”. Pada kenyataannya, terdapat 11 daerah yang tidak mengalami hal tersebut. kondisi bencana banjir bandang dialami setiap tahunnya di Kabupaten OKU Selatan (Gambar 9). Hal ini berbeda dengan bencana banjir, banjir bandang merupakan kondisi ekstrim dimana air yang datang secara tiba-tiba dengan volume yang besar. Sehingga daya rusak biasanya sangat besar dan kegiatan

antisipasi sulit dilakukan. Bencana banjir badang seringkali dipengaruhi oleh aktifitas antropogenik berupa pembalakan liar dan pemukiman di wilayah resapan air. Pembalakan membuat wilayah hutan di hulu terdapat banyak potongan log kayu hutan dan lahan menjadi kritis akibat tidak adanya penahan tanah yang potensial terjadi longsor. Akibatnya jika hujan turun dengan intensitas tinggi, terjadi longsor dan menghanyutkan log kayu serta material longsor membendung aliran sungai. Sementara pembangunan di wilayah resapan air membuat air hujan yang turun tidak terserap dan masuk ke dalam tanah sehingga laju aliran air semakin kencang.

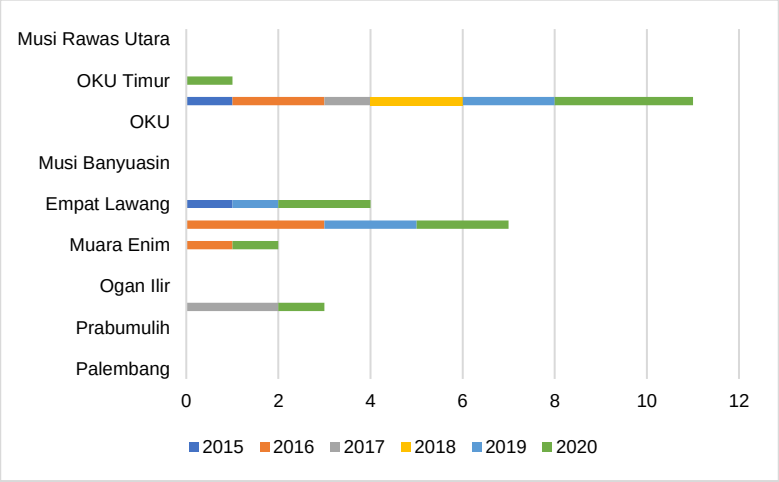

Gambar 9. Kejadian Bencana Banjir Bandang Tahun 2015-2020

4.1.4 Tanah Longsor

Tanah longsor atau sering disebut gerakan tanah atau dinamika tanah yang merupakan suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan masa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Biasanya bencana ini dapat disebabkan karena hutan yang gundul akibat ulah manusia yang menebang hutan sembarangan. Secara umum kejadian longsor disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong adalah faktor-faktor yang memengaruhi kondisi material sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut.

Kejadian bencana tanah longsor secara berulang banyak terjadi di Kabupaten OKU Selatan. Hal ini disebabkan pada wilayah kabupaten OKU Selatan terdiri dari dataran tinggi dengan kelerengan yang cukup terjal. Sehingga ketika hujan turun menyebabkan tanah labil dan rawan longsor. Kondisi tanah labil ini juga diperparah dengan pembukaan hutan yang berada di lereng-lereng bukit untuk dijadikan lahan pertanian. Lahan pertanian yang mayoritas digunakan untuk tanaman hortikultura, tidak memiliki perakaran yang kuat untuk mengikat tanah dan penyerapan air. Sehingga ketika hujan turun, *runoff* air hujan mengikis lapisan tanah dan potensial menyebabkan longsor. Selengkapnya kejadian bencana longsor tahun 2015-2020 dapat dilihat pada Gambar 10.

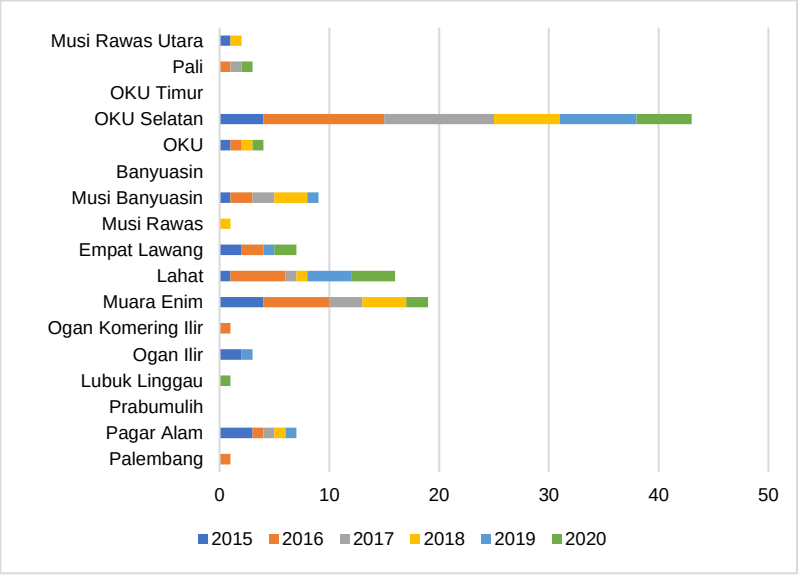

Gambar 10. Kejadian Bencana Tanah Longsor Tahun 2015-2020

4.1.5 Kecelakaan Kapal

Kecelakaan transportasi adalah kecelakaan moda transportasi yang terjadi di darat, laut, dan udara. Di Provinsi Sumatera Selatan, kecelakaan kapal paling banyak terjadi di Kabupaten Banyuasin mengingat tingginya aktivitas transportasi kapal diwilayah perairan Kabupaten Banyuasin. Penyebab kecelakaan kapal cukup bervariasi, mulai dari kelalaian pengemudi, faktor kegagalan teknis kapal hingga kondisi lingkungan perairan yang ekstrim sehingga menyebabkan

kecelakaan. Kelalaian pengemudi sebagian besar disebabkan oleh kondisi pengemudi kapal dalam keadaan mengantuk atau tidak fit, sehingga konsentrasi menurun yang menyebabkan kapal kehilangan kendali dan pengemudi lambat merespon kondisi lalu lintas perairan. Faktor lain yang sering menyebabkan kecelakaan adalah banyaknya material log/kayu dan sampah lain di perairan yang menyebabkan kapal menabrak log kayu dan sampah sehingga menyebabkan kecelakaan.

Kecelakaan kapal sering kali memakan korban jiwa yang cukup banyak. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh tingkat kepatuhan pada prosedur keselamatan terutama penyediaan pelampung dan *life jacket* yang sering tidak disediakan penyedia kapal dan kewajiban penggunaan *life jacket* bagi penumpang yang sering diabaikan. Selengkapnya kejadian bencana kecelakaan kapal tahun 2015-2020 dapat dilihat pada Gambar 11.

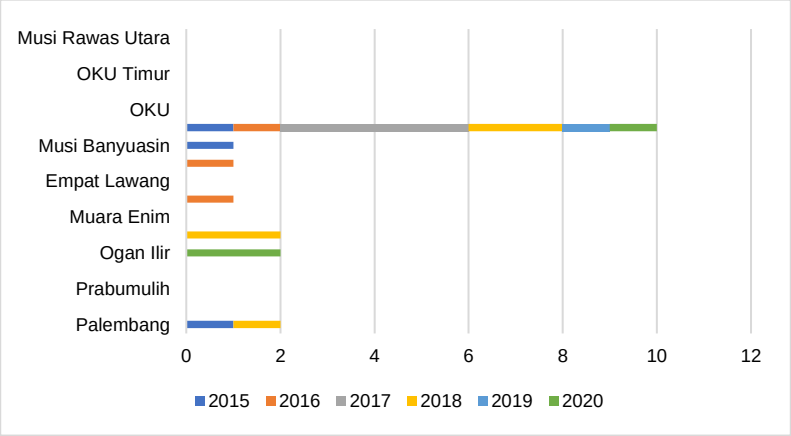

Gambar 11. Kejadian Bencana Banjir Tahun 2015-2020

4.1.6 Kebakaran Pemukiman

Kebakaran merupakan situasi dimana bangunan pada suatu tempat seperti rumah/pemukiman, pabrik, pasar, gedung, dan lain-lain dilanda api yang menimbulkan korban dan/atau kerugian.

Bencana ini dipengaruhi oleh karena kerapatan rumah penduduk di suatu wilayah, sambungan arus pendek listrik, maupun kelalain aktivitas manusia dalam mengendalikan penggunaan api. Seperti terlihat pada data Gambar 12. bencana kebakaran pemukiman secara signifikan

tertinggi di Kota Palembang. Tingkat kepadatan penduduk mempengaruhi jumlah rumah dan pemukiman yang terbakar berulang setiap tahun. Bencana ini telah menimbulkan kerugian adanya kematian Jiwa, kerusakan rumah yang menghasilkan kerugian ekonomi yang cukup besar. Upaya preventif yang dilakukan adalah penataan khususnya kawasan kumuh perkotaan yang terlalu padat dan standarisasi jaringan kelistikan sering diabaikan.

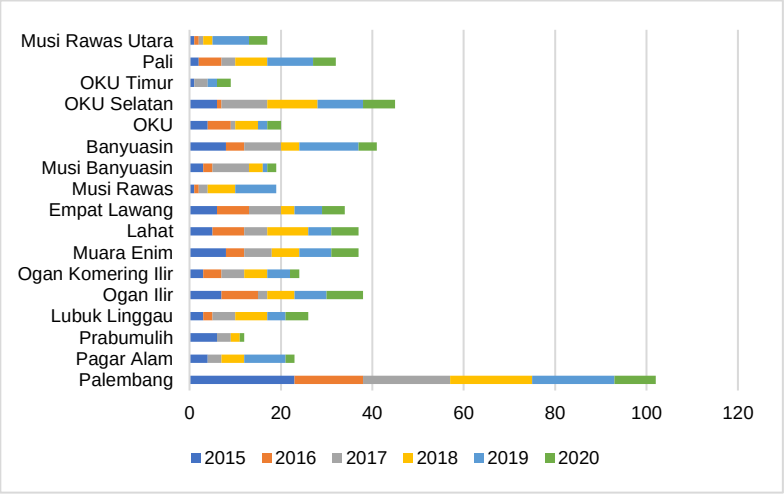

Gambar 12. Kejadian Bencana Banjir Tahun 2015-2020

4.1.7 Gempa Bumi

Bencana gempabumi merupakan peristiwa pelepasan energi yang menyebabkan dislokasi (pergeseran) pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba. Kejadian gempabumi dapat disebabkan oleh proses tektonik akibat pergerakan kulit/lempeng bumi, aktivitas sesar di permukaan bumi, atau pergerakan geomorfologi secara lokal.

Berdasarkan data kajian risiko bencana, Beberapa daerah di Sumatera Selatan seperti Lahat, OKU Selatan dan Empat Lawang masuk dalam kategori memiliki bahaya “tinggi”. Hal tersebut tidak terjadi sehingga dapat mengurangi dampak dari resiko tersebut. Kejadian bencana gempa bumi adalah salah satu kejadian yang sulit diprediksi kapan akan terjadi. Sehingga langkah penanganan dilakukan berfokus pada upaya mitigasi dan pengurangan resiko bencana gempa bumi. Pengurangan resiko terutama korban jiwa sangat ditentukan dari waktu peringatan terjadinya

gempa besar sampai di wilayah pemukiman/ masyarakat. Selain upaya peringatan dini, edukasi kepada masyarakat tentang apa yang harus dilakukan dan jalur evekuasi jika terjadi bencana gempa besar sangat menentukan persentase korban jiwa akibat bencana gempa bumi.

Berdasarkan data kejadian bencana gempa bumi tahun 2015-2020, hanya Kabupaten OKU yang pernah terjadi (gambar 13). Namun kesiap-siagaan insfasrtuktur peringatan dini dan edukasi kepada masyarakat, tertama Kabupaten yang berpotensi tinggi terjadi gempa bumi harus terus dipelihara dan ditingkatkan.

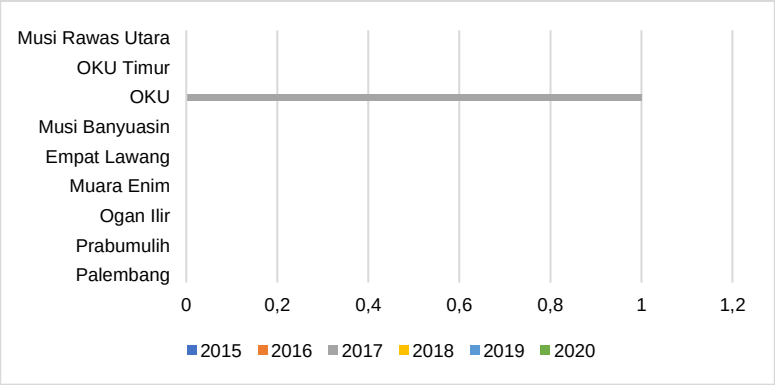

Gambar 13. Kejadian Bencana Banjir Tahun 2015-2020

4.1.8 Kebakaran Lahan dan Hutan

Kebakaran hutan dan lahan merupakan kebakaran permukaan dimana api membakar bahan bakar yang ada di atas permukaan (misalnya: serasah, pepohonan, semak, dan lain-lain), api kemudian menyebar tidak menentu secara perlahan di bawah permukaan (*ground fire*), membakar bahan organik melalui pori-pori gambut dan melalui akar semak belukar/pohon yang bagian atasnya terbakar.

Kejadian kebakaran hutan dan lahan, terutama lahan gambut di Sumatera Selatan merupakan bencana nasional yang berulang setiap tahun. Luasnya lahan gambut di Sumatera Selatan adalah 1,73 juta hektar (data CIFOR 2020). Sebagian besar berada di lahan konsesi perusahaan perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri, hutan lindung, dan areal kelola masyarakat (APL).

Pada tahun 2015 terjadi fenomena *El Nino*, dimana terjadi anomali suhu yang lebih hangat daripada kondisi normal, sehingga membuat

curah hujan berkurang dan menyebabkan kekeringan ekstrim. Kondisi kekeringan ekstrim membuat kejadian kebakaran pada tahun 2015 baik secara jumlah maupun areal terbakar sangat besar (Tabel 13). Kekeringan membuat bahan organik menjadi lebih mudah terbakar dan ketidak tersediaan air untuk upaya pemadaman. Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan terutama pada lahan gambut dilakukan dengan penyediaan infrastruktur pemantauan dan penanggulangan kebakaran, penyadaran dan pelatihan masyarakat tentang model-model pengelolaan lahan tanpa bakar dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran.

4.1.9 Pandemi Covid-19

Epidemi, wabah atau kejadian luar biasa (KLB) adalah wabah penyakit yang menyebar secara cepat, luas dan besar. Pada skala besar epidemi ini dikenal dengan pandemic. Pada tahun 2020, seluruh dunia tersebar penyakit yang diakibatkan oleh virus korona. Pemerintah telah menetapkan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana non-alam. Sejak diumumkannya kasus konfirmasi pertama pada Maret 2020, dalam rentang waktu satu bulan, seluruh provinsi telah melaporkan kasus konfirmasi. Seperti ditunjukkan pada Tabel 13, sampai dengan 3 Januari 2021, di Sumatera Selatan terdapat 11.945 orang pasien positif, 615 orang (5,15%) meninggal dan 9699 (81,20%) orang sembuh.

Tabel 13. Data Perkembangan Pandemi Covid 19 di Sumatera Selatan

NAMA KAB / KOTA	KASUS		KONFIRMASI								
			JUMLAH		SEMBUH		MENINGGAL		PROSES		
	ASIMPTOMATIK	SIMPTOMATIK	KUMULATIF	BARU	KUMULATF	BARU	KUMULATIF	BARU	DIRAWAT	ISOLASI MANDIRI	JUMLAH
Kota Palembang	1794	3767	5561	+32	4322	+48	271	0	333	635	968
Kabupaten OKI	65	51	116	0	96	0	9	0	8	3	11
Kabupaten Lahat	298	172	470	0	378	+8	30	0	15	47	62
Kabupaten OKU	92	99	191	+4	162	0	19	+1	8	2	10
Kabupaten MUBA	297	425	722	0	608	0	30	0	69	15	84
Kabupaten M. Enim	457	564	1021	0	861	0	51	0	21	88	109
Kabupaten MURA	196	168	364	+1	326	+3	14	0	7	17	24
Kab. Banyuasin	289	216	505	+2	431	+1	45	0	8	21	29
Kab.Ogan Ilir	103	62	165	0	150	0	9	0	2	4	6
Kota Prabumulih	145	346	491	+4	410	+8	23	+1	37	21	58
Kota Pagaralam	73	38	111	0	95	0	8	0	3	5	8
Kota Lubuk Linggau	481	688	1169	+1	1013	0	39	0	45	72	117
Kab. OKU Timur	176	96	272	+1	185	+10	14	0	7	66	73
Kabu.OKU Selatan	11	20	31	0	18	0	4	0	6	3	9
Kab. E. Lawang	34	53	87	0	80	0	7	0	0	0	0
Kabupaten PALI	250	141	391	0	302	0	26	0	9	54	63
Kab. MURATARA	52	188	240	0	225	0	15	0	0	0	0
Luar Wilayah Sumsel	17	21	38	0	37	0	1	0	0	0	0
JUMLAH	4830	7115	11945	+45	9699	+78	615	+2	578	1053	1631

Sumber: Pemprov. Sumsel, 2021

Tabel 14. Jumlah Hotspot dan Lokasi serta Luas Areal Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2019

No	Kabupaten/ Kota	2015		2016		2017		2018		2019	
		Jumlah Hotspot	Area Terbakar (Ha)	Jumlah Hotspot	Area Terbakar (Ha)	Jumlah Hotspot	Area Terbakar (Ha)	Jumlah Hotspot	Area Terbakar (Ha)	Jumlah Hotspot	Area Terbakar (Ha)
1	Banyuasin	1.665	141.126	59	55	113	117	221	7.748	1.511	78.656
2	Empat Lawang	119	914	29	30	44	-	67	-	213	51
3	Lahat	243	2.789	38	37	42	-	52	-	168	50
4	Muara Enim	939	30.196	64	57	117	326	145	4.310	471	8.737
5	PALI	234	5.904	71	105	78	-	33	226	386	2.971
6	Musi Banyuasin	5.249	108.281	114	155	76	72	175	797	3.025	60.316
7	Musi Rawas	673	37.763	167	107	124	123	144	1.168	596	11.156
8	Muratara	602	14.501	102	16	94	-	67	192	796	14.027
9	Ogan Ilir	226	12.297	20	157	72	-	94	3.657	644	14.759
10	OKI	16.008	377.333	153	66	203	77	832	17.399	8.434	222.597
11	OKI	412	1.088	68	53	98	-	85	-	182	3.016
12	OKU Selatan	312	-	52	17	64	-	89	-	147	198
13	OKU Timur	302	3.991	16	82	58	27	56	126	388	11.742
14	Lubuk Linggau	18	-	6	7	15	-	3	-	10	-
15	Pagaralam	8	-	2	4	2	-	4	-	15	-
16	Palembang	13	380	4	2	6	-	9	193	25	177
17	Prabumulih	20	-	8	8	8	-	5	-	12	-
Sumatera Selatan		**27.043**	**736.563**	**973**	**958**	**1.214**	**742**	**2.081**	**35.814**	**17.023**	**428.453**

Sumber: Jumlah Hotspot = BPBD Prov. Sumsel; Luas Area Terbakar = Dinas Kehutanan Sumsel (Dishut Sumsel 2020)

4.2 Data Kejadian Bencana Berdasarkan Wilayah

4.2.1 Kabupaten Ogan Komering Ulu

Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) terletak antara 103^{o} 40' sampai 104^{o} 33' Bujur Timur dan 3^{o} 45' sampai 4^{o} 55' Lintang Selatan dengan batas wilayah:

- Utara : Kecamatan Rambang dan Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim dan Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir;
- Selatan : Kecamatan Simpang, Muaradua, Buay Sandang Aji, Sanda Buay Runjung dan Kecamatan Kisam Tinggi, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Barat : Kecamatan Semendo Darat Ulu, Semendo Darat Laut, Tanjung Agung dan Kecamatan Kisam Tinggi, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
- Timur : Kecamatan Cempaka, Madang Suku I, II dan III, Buay Pemuka Peliung dan Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ketinggian bervariasi dari dataran rendah hingga dataran tinggi dengan ketinggian antara 25 mdpl hingga 500 mdpl, dengan luas daratan 4.797,06 km^{2}. Terdiri dari 13 Kecamatan dengan Baturaja sebagai ibukota kabupaten (BPS OKU, 2020).

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia 2018 yang dikeluarkan BNPB, Kabupaten OKU merupakan salah satu daerah rawan bencana kategori tinggi dengan skor 155. Resiko bencana tinggi karena Kabupaten OKU dikelilingi titik resiko bencana alam seperti anak Gunung Krakatau di Selat Sunda, Gunung Dempo, Gunung Semunung dan beberapa aliran sungai besar dan kecil yang berpotensi menyebabkan banjir dan banjir bandang seperti DAS Ogan dan DAS Bengkayap (Rosihan et.al., 2019).

Berdasarkan RTRW Kabupaten OKU Tahun 2012-2032, untuk bencana banjir terdapat 3 kategori; tinggi, sedang dan rendah. Kategori tinggi terdapat di daratan rendah <25 mdpl disepanjang Sempadan Sungai Ogan dan Sungai Lengkayap. Kategori sedang berada pada daratan dengan ketinggian antara 25-100 mdpl yang berada di sebagian kecamatan Baturaja Timur, Baturaja Barat dan sekitar sempadan Sungai Ogan dan Lengkayap. Sedangkan kategori rendah berada pada daerah

dengan ketinggian 25-100 dmpl yang tergenang secara periodik akibat aliran air permukaan dan intensitas hujan yang tinggi.

Bencana longsor terjadi pada wilayah perbukitan dan lereng tebing sungai yang tingkat kemiringannya tinggi. Semakin tinggi tingkat kemiringan, semakin tinggi resiko bencana longsor. Lokasi bencana longsor resiko tinggi dengan tingkat memiringan lahan >40% terdapat di Kecamatan Ulu Ogan, Kecamatan Pengandonan, Kecamatan Muara Jaya, Kecamatan Sosoh Buay Rayap dan Kecamatan Lengkiti. Sementara resiko longsor sedang, berada pada daratan dengan kemiringan lahan antara 20-40% yang berada di Kecamatan Ulu Ogan, Kecamatan Pengandonan, Kecamatan Lengkiti, Kecamatan Semidang Aji, Kecamatan Lubuk Batang, Kecamatan Sosoh Buay Rayap dan Kecamatan Muara Jaya. Daratan dengan kemiringan lahan kurang dari 20% terkategori beresiko rendah terjadi bencana longsor, yang berada di Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kecamatan Baturaja Barat, Kecamatan Baturaja Timur, Kecamatan Lubuk Raja, Kecamatan Sinar Peninjauan, dan Kecamatan Peninjauan.

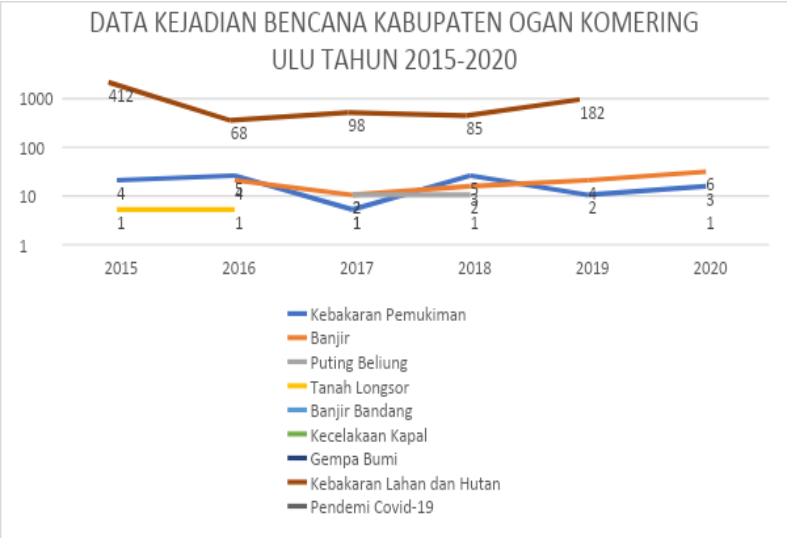

Gambar 14. Data Kejadian Bencana Kab. Ogan Komering Ulu Tahun 2015-2020
Sumber: BPBD Prov. Sumsel
Keterangan: data kebakaran lahan dan hutan menggunakan data hot spot.

Kejadian bencana di Kabupaten OKU yang berulang dari tahun 2015-2020, yaitu: kebakaran lahan dan hutan, kebakaran pemukiman,

banjir, angin puting beliung dan tanah longsor. Kebakaran hutan dan lahan banyak terjadi pada tahun 2015, yaitu sebanyak 412 hot spot, kemudian menurun tajam pada tahun 2016 hingga 2019, berturut-turut menjadi 68, 98, 85 dan 182. Hal tersebut terjadi karena terjadi fenomena alam el nino pada tahun 2015 yaitu kejadian kekeringan yang ekstrim sehingga membuat lahan dan hutan menjadi sangat rentan terbakar dan kebakaran yang terjadi sulit dikendalikan. Bencana banjir terjadi hampir setiap tahun dengan jumlah kejadian pada tahun 2015 nihil, tahun 2016 sampai tahun 2020 berturut-turut terjadi 4,2,3,4, dan 6 kali kejadian. Sementara bencana tanah longsor dan angin puting beliung terjadi 1-2 kali dalam setahun. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 14 dan lampiran 2.

4.2.2 Kabupaten Ogan Komering Ilir

Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) terletak antara 2^0 30'-4^0 15' Lintang Selatan dan 104^0 20'-106^0 00' Bujur Timur. Kabupaten OKI dari 18 kecamatan dengan Kayu Agung sebagai ibukota Kabupaten. Batas-batas Kabupaten OKI adalah:

- Utara : Kab. Banyuasin, Kab. Ogan Ilir dan Kota Palembang;
- Selatan : Kab. OKU Timur dan Provinsi Lampung;
- Barat : Kabupaten Ogan Ilir;
- Timur : Selat Bangka dan Laut Jawa.

Luas wilayah Kabupaten OKI adalah 19.023,47 km^2 yang 75 persen wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 30 mdpl. Sisanya atau sekitar 5% merupakan daratan dengan ketinggian 40 mdpl yang berada di Kecamatan Mesuji (BPS OKI, 2020).

Indeks Resiko Bencana Tahun 2018 memasukkan Kabupaten OKI dalam kategori Tinggi dengan skor 153,20. Tingginya resiko bencana terutama disebabkan oleh bencana banjir karena tipologi dataran rendah yang tergenang oleh paparan banjir dari sungai-sungai besar dan kebakaran lahan dan hutan pada lahan gambut yang dominan di Kabupaten OKI, yaitu seluas 769.000 Hektar (Ha) dari total luas lahan gambut di Sumsel mencapai 1,4 juta Ha (Rezeki et al., 2018 & Wahyunto et al., 2005).

Data kejadian bencana di Kabupaten OKI tahun 2015-2020 (Gambar 15) menunjukkan bahwa kejadian bencana yaitu kebakaran lahan dan hutan, kebakaran pemukiman, banjir, dan puting beliung. Kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten OKI sangat sering terjadi dan merupakan bencana nasional nasional. Kebakaran berulang dengan

jumlah hotspot yang tinggi pada tahun 2015 sebanyak 16.008 hotspot, tahun 2016 menurun drastis menjadi 153 hotspot, tahun 2017 sebanyak 203 hotspot, tahun 2018 832 hotspot, dan kembali meningkat menjadi 8.434 hotspot. Kebakaran disebabkan karena di Kabupaten OKI terdapat lahan gambut yang rentan terbakar dan apabila telah terbakar sangat sulit dikendalikan karena api menyebar secara lambat dan tidak menentu di bawah permukaan. Selain itu juga tingginya aktivitas manusia di areal gambut baik yang diusahakan oleh masyarakat lokal maupun koorporasi skala besar turun menjadi faktor kebakaran hutan dan lahan. Penggunaan api semakin meningkat dalam kaitannya dengan sonor, pembalakan, perikanan, diikuti dengan lahan yang terdegradasi baik secara alami maupun akibat kepentingan pembangunan skala besar. Kebakaran pemukiman terjadi berulang dengan jumlah kejadian berturut dari tahun 2015-2020 yakni 3, 4, 5, 5, 5 kali kejadian. Banjir terjadi sebanyak 2, 4, 2, 3, dan 4 kali kejadian dari rentang 2015-2020. Sementara puting beliung terjadi hanya di tahun 2019 dari total 10 kejadian di tahun 2015-2020.

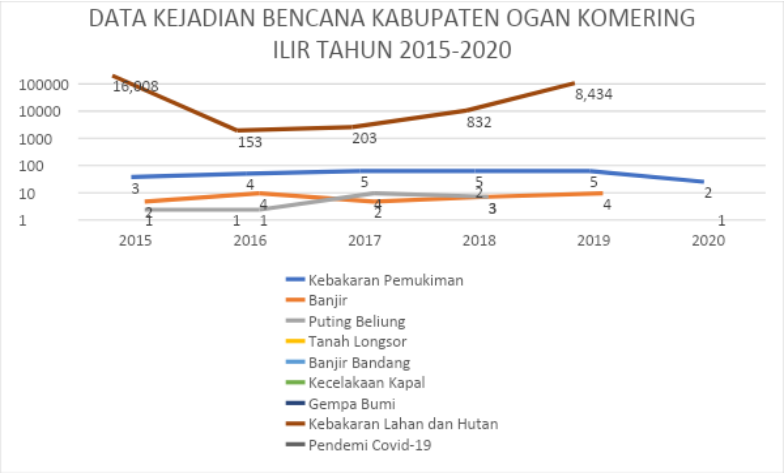

Gambar 15. Data Kejadian Bencana Kab. Ogan Komering Ilir Tahun 2015-2020
Sumber: BPBD Prov. Sumsel
Keterangan: data kebakaran lahan dan hutan menggunakan data hot spot.

4.2.3 Kabupaten Muara Enim

Kabupaten Muara Enim terletak antara 3^0 3’ 21”-4^0 15’ 14” Lintang Selatan dan 103^0 18’ 18”-104^0 42’ 4,99” Bujur Timur. Luas Kabupaten Muara Enim adalah 7.483,06 Km^2 yang terdiri dari 22 kecamatan dengan

ibukota Kabupaten berada di Muara Enim. Batas-batas kabupaten Muara Enim adalah:

- Utara : Kota Palembang, Kab. Musi Banyuasin dan Kab. PALI;
- Selatan : Kab. OKU dan OKU Selatan;
- Timur : Kab. Ogan Ilir, Kab. OKI dan Kota Prabumulih;
- Barat : Kab. Musi Rawas dan Kab. Lahat.

Topografi wilayah cukup beragam dengan dataran tinggi yang berada pada rangkaian Bukit Barisan di Kecamatan Semende Darat Laut, Semende Darat Ulu, Semende Darat Tengah dan Kecamatan Tanjung Agung serta wilayah dataran rendah di wilayah sepanjang aliran Sungai Musi yang meliputi kecamatan lembak, Gelumbang, dan Sungai Rotan (BPS Muara Enim, 2020).

Resiko bencana Kabupaten Muara Enim berdasarkan Indeks Resiko Bencana Indonesia tahun 2018 terkategori Tinggi dengan nilai 155,2. Berdasarkan RTRW Kabupaten Muara Enim tahun 2018-2038 ditetapkan lima jenis bencana dengan tingkat kerawanan dan ancaman paling tinggi, yaitu: tanah longsor, banjir, kebakaran hutan dan lahan, angin puting beliung, dan gempa bumi.

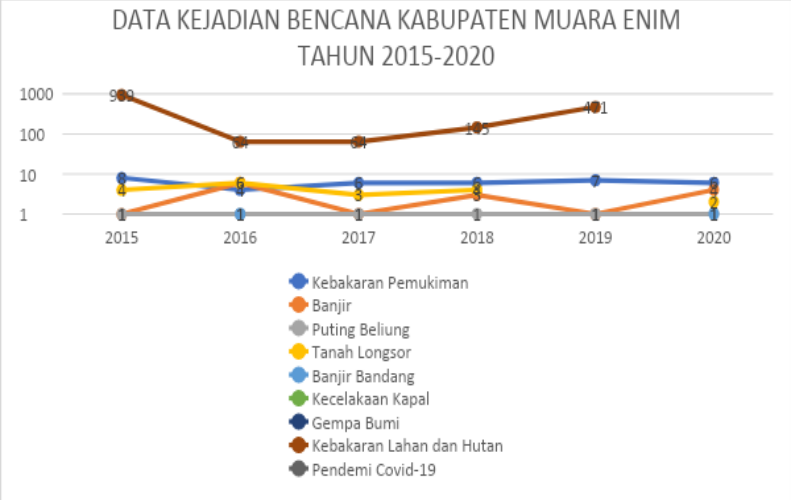

Gambar 16. Data Kejadian Bencana Kab. Muara Enim Tahun 2015-2020
Sumber: BPBD Prov. Sumsel
Keterangan: data kebakaran lahan dan hutan menggunakan data hot spot.

Berdasarkan data kejadian bencana Tahun 2015-2020, terlihat bahwa bencana berulang di kabupaten Muara Enim adalah kebakaran

hutan dan lahan, kebakaran pemukiman, banjir, angin puting beliung dan tanah longsor. Kebakaran hutan dan lahan banyak terjadi pada tahun 2015 dengan hotspot sebanyak 939, tahun 2016 hingga 2019 berturut-turut yakni 54, 64, 145, 471 hotspot. Kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 selain dipengaruhi oleh *el nino* juga karena akibat aktivitas manusia khususnya lokasi kebakaran yang berada dalam kawasan. Tanah longsor menjadi salah satu bencana yang cukup sering terjadi di Kabupaten Muara Enim mengingat topografi wilayah dengan kemiringan lereng 60%-90% dan berkurangnya tutupan lahan/vegetasi di daerah hulu akibat pembukaan lahan, ditambah dengan curah hujan yang tinggi.

4.2.4 Kabupaten Lahat

Kabupaten Lahat terletak diantara 3^0 25'-4^0 15' Lintang Selatan dan 102^0 37'-103^0 45' Bujur Timur. Batas-batas wilayah adalah:

- Utara : Kabupaten Muara Enim dan Musi Rawas;
- Selatan : Kota Pagaralam dan Kab. Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
- Timur : Kabupaten Muara Enim;
- Barat : Kabupaten Empat Lawang.

Luas Kabupaten Lahat adalah 4.361,83 Km^2 dengan sebagian besar merupakan wilayah dataran tinggi hingga ketinggian 1000 mdpl. Wilayah dataran rendah hanya terdapat di Kecamatan Lahat, Kecamatan Merapi Timur, dan Kecamatan Merapi Barat dengan ketinggian antara 25-100 mdpl (BPS Kab. Lahat, 2020). Kondisi topografi wilayah Kabupaten Lahat dilihat dari kemiringan lerengnya didominsi oleh kemiringan lereng > 40 % yaitu seluas 2.729,38 Km^2 atau sekitar 41,24 % dari luas wilayah Kabupaten Lahat. Kemiringan lereng pada masing-masing kecamatan di wilayah Kabupaten Lahat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu 0–3 %, 3-12 %, 12–40 % dan 40 % ke atas. Daerah yang mempunyai kemiringan lereng 0–3 % terbesar terdapat di Kecamatan Kikim dengan luas 537,39 Km^2, sementara untuk Kecamatan Pulau Pinang sama sekali tidak mempunyai lahan dengan kemiringan tersebut. Untuk kemiringan antara 3-12 % juga paling banyak terdapat di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi dengan luas 22,77 Km^2.

Indeks Resiko Bencana Kabupaten Lahat Tahun 2018 terkategori Sedang dengan nilai 109,07. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lahat Tahun 2012-2032 menetapkan bencana banjir dan tanah longsor sebagai kejadian rawan bencana alam di Kabupaten Lahat.

Kejadian rawan banjir terjadi di Kecamatan Kikim Timur, Kecamatan Merapi Timur, Kecamatan Merapi Barat dan Kecamatan Lahat. Sedangkan wilayah kejadian rawan longsor terdapat di Kecamatan Pseksu, Kecamatan Pajar Bulan, Kecamatan Jarai, Kecamatan Pulau Pinang, Kecamatan Tanjung Sakti PUMI, Kecamatan Tanjing Sakti PUMU, Kecamatan Gumay Talang, Kecamatan Kikim Selatan, Kecamatan Kikim Barat dan Kecamatan Kota Agung.

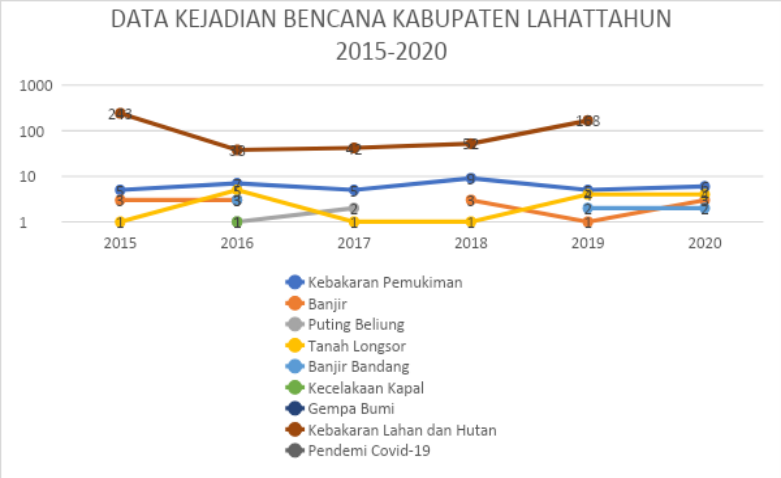

Gambar 17. Data Kejadian Bencana Kabupaten Lahat Tahun 2015-2020
Sumber: BPBD Prov. Sumsel
Keterangan: data kebakaran lahan dan hutan menggunakan data hot spot.

Berdasarkan data kejadian bencana Kabupaten Lahat 2015-2020 terdapat empat kejadian bencana berulang, yaitu: kebakaran hutan dan lahan, kebakaran pemukiman, tanah longsor, banjir, dan banjir bandang. Kejadian kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 dengan jumlah hotspot sebanyak 243 juga dipicu karena el nino dan aktivitas manusia. Sementara penyebab terjadinya longsor dipengaruhi oleh kemiringan lereng lebih dari 40% semakin tinggi kemiringan lereng maka akan semakin besar potensi terjadinya longsor, curah hujan yang cukup tinggi, dan lahan yang terdegradasi karena aktivitas manusia. Selain tingginya intensitas curah hujan, banjir dan banjir bandang yang terjadi berulang di Kabupaten Lahat dipicu karena berkurangnya daerah serapan air di hulu wilayah-wilayah yang rentan terjadi banjir, hal ini terjadi karena tingginya aktivitas manusia yang menyebabkan lahan terdegradasi.

4.2.5 Kabupaten Musi Rawas

Batas koordinat Kabupaten Musi Rawas adalah 102^0 07' 00"–103^0 40' 10" Bujur Timur dan 02^0 20' 00"–03^0 38' 00" Lintang Selatan. Luas wilayah : 6.357,17 km^2 dengan batas-batas adalah:

- Utara : Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Timur : Kabupaten Musi Banyuasin dan Kab. Muara Enim;
- Selatan : Kabupaten Empat Lawang; dan
- Barat : Provinsi Bengkulu dan Kota Lubuklinggau.

Topografi Kabupaten Musi Rawas menunjukkan bahwa topografi Kabupaten Musi Rawas cukup bervariasi, terdiri dari pegunungan, perbukitan dan dataran. Hampir 30% dari luas wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara di sebelah barat termasuk deretan Pegunungan Bukit Barisan. Kemiringan lereng di daerah ini mencapai >40% sehingga dikategorikan sebagai pegunungan dengan akses jalan yang relatif sulit untuk dilalui. Bagian tengah Kabupaten Musi Rawas merupakan daerah dataran dengan kemiringan lereng <25%. Setidaknya ada dua sungai besar dan beberapa anak sungai yang mengalir di daerah ini sehingga banyak pula menghasilkan bentukan-bentukan fluvial.

Terdiri dari 14 Kecamatan dengan Kecamatan Muara Beliti sebagai Ibukota Kabupaten. Ketinggian wilayah bervariasi antara 82,50 hingga 230 mdpl (BPS Kab. Musi Rawas, 2020). Kabupaten Musi Rawas tergolong beresiko Tinggi dengan skor 155,2 berdasarkan Indeks Resiko Bencana Tahun 2018 yang dikeluarkan BNPB.

Berdasarkan data kejadian bencana tahun 2015-2020, terdapat kebaran hutan dan lahan, bencana banjir, kebakaran pemukiman, dan angin puting beliung. Kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015-2020 bertur-turut dengan jumlah hotspot 673, 167, 124, 144, dan 596 titik hotspot. Penyebab kejadian kebakaran hutan dan lahan dengan jumlah hotspot terbanyak ditahun 2015 selain dipicu karena elnino juga aktivitas manusia dalam pengelolahan lahan baik oleh masyarakat maupun aktivitas perusahaan sawit dan HTI. Sedangkan banjir terjadi berulang setiap tahunnya dengan jumlah 4, 5, 3, 4, dan 3 pada tahun 2015- 2020 kecuali tahun 2017. Banjir merupakan salah satu bencana yang ada di Kabupaten Musi Rawas. Kejadian banjir sangat ditentukan oleh kondisi hidrologi dan terdapat dua sungai besar dan beberapa anak sungai, tingginya intensitas hujan serta berkurangnya daerah resapan air karena aktivitas manusia dalam pengelolaan lahan, daerah terdampak banjir umumnya berada di daerah pertemuan antara Sungai Rawas dan Sungai

Rupit, serta di sepanjang aliran kedua sungai tersebut. Sementara angin puting beliung terjadi pada tahun 2016-2019 berturut-turut terjadi sebanyak 4, 1, 2, dan 3 kali kejadian.

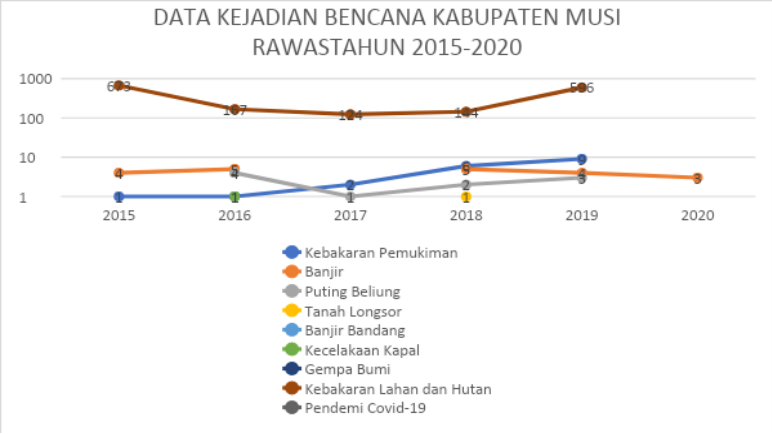

Gambar 18. Data Kejadian Bencana Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015-2020
Sumber: BPBD Prov. Sumsel
Keterangan: data kebakaran lahan dan hutan menggunakan data hot spot.

4.2.6 Kabupaten Musi Banyuasin

Kabupaten Musi Banyuasin terletak antara $1,3^0$ sampai dengan 4^0 Lintang Selatan dan 103^0 sampai dengan 104^045' Bujur Timur dengan batas wilayah:

- Utara : Provinsi Jambi
- Selatan : Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
- Barat : Kabupaten Musi Rawas
- Timur : Kabupaten Banyuasin

Kabupaten Musi Banyuasin merupakan daerah rawa dan sungai besar serta kecil seperti Sungai Musi, Sungai Banyuasin, Sungai Batanghari Leko, dan lain-lain. Untuk aliran Sungai Musi yang berada dibagian timur dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. Disamping itu juga daerah ini terdiri dari lebak dan danau-danau kecil dan memiliki sebanyak 25 DAS. Daerah lainnya merupakan datarang tinggi dan berbukit-bukit dengan ketinggian 10-70 mdpl (BPS Kab. Musi Banyuasin, 2020). Kabupaten Musi Banyuasin tergolong beresiko sedang dengan

skor 132,40 berdasarkan Indeks Resiko Bencana Tahun 2018 yang dikeluarkan BNPB.

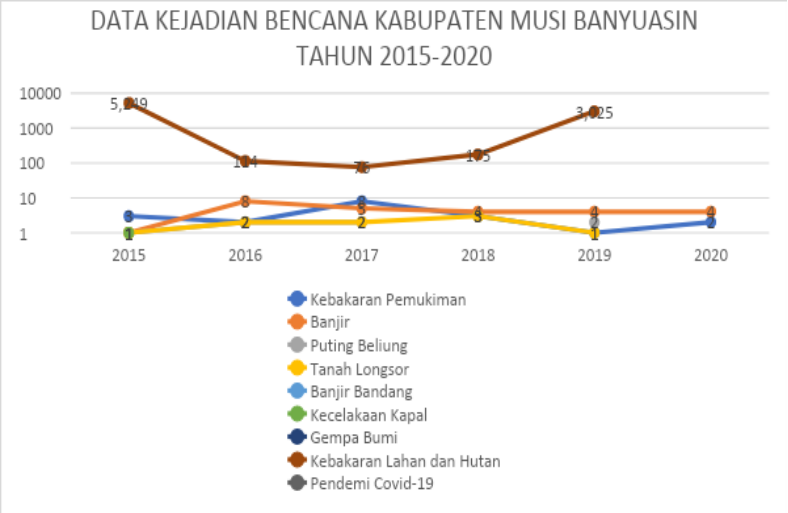

Gambar 19. Data Kejadian Bencana Kab. Musi Banyuasin Tahun 2015-2020
Sumber: BPBD Prov. Sumsel
Keterangan: data kebakaran lahan dan hutan menggunakan data hot spot.

Berdasarkan data kejadian bencana Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2015-2020 terdapat bencana banjir, kebakaran pemukiman, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan dan angin puting beliung. Berdasarkan RTRW Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2016-2036 kawasan rawan bencana sebagai berikut;

a. Kawasan rawan kebakaran hutan dan laban terletak di Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Lalan, Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Tungkal Jaya, Kecamatan Lais, Kecamatan Sungai Keruh, Kecamatan Plakat Tinggi, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sekayu.
b. Kawasan rawan banjir terletak di Kecamatan Lais, Kecamatan Sekayu, Kecamatan Lawang Wetan, Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Sanga Desa, dan Kecamatan Batanghari Leko.
c. Kawasan yang pernah terjadi dan rawan terjadinya longsor dinding sungai ini seperti Kecamatan Sekayu, Lais dan Sanga Desa.
d. Angin Puting Beliung pernah terjadi beberapa kali seperti misalnya di Kecamatan Sekayu.

Kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 di Kabupaten Musi Banyuasin dengan hotspot terbanyak yaitu 5.249. Fenomena El-Nino tahun 2015 bukan penyebab utama kejadian kebakaran gambut, tetapi masih maraknya illegal logging dan 'open access' area yang menjadi masalah utama pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lalan Mangsang Mendis menjadi faktor pemicu terjadinya kebakaran gambut di kabupaten Banyuasin (Tata, 2015). Sementara banjir yang juga merupakan bencana berulang setiap tahunnya terjadi dari tahun 2015-2020 berturut-turut terjadi sebanyak 1,8,5,4,4, dan 4 kali disebabkan karena kondisi topografi wilayah dan tingginya curah hujan. Kebakaran pemukiman disebabkan karena kerapatan rumah penduduk di suatu wilayah, sambungan arus pendek listrik, maupun kelalain aktivitas manusia dalam mengendalikan penggunaan api.

4.2.7 Kabupaten Banyuasin

Kabupaten Banyuasin mempunyai wilayah seluas 11.832,99 Km2 dan terbagi menjadi 21 kecamatan. Kecamatan terluas yaitu Kecamatan Banyuasin II dengan wilayah seluas 3.494,48 Km^2. Sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Karang Agung Ilir dengan wilayah seluas 137,92 Km^2. Secara administratif, Kabupaten Banyuasin mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Utara : Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dan Selat Bangka.
- Timur : Kec. Pampangan dan Air Sugihan Kabupaten OKI.
- Selatan : Kec. Jejawi Kab. Ogan Komering Ilir, Kota Palembang, Kec. Sungai Rotan dan Talang Ubi Kab. Muara Enim.
- Barat : Kabupaten Musi Banyuasin

Kabupaten Banyuasin memiliki topografi 80 % wilayah datar berupa lahan rawa pasang surut dan rawa lebak, sedangkan yang 20 % lagi berombak sampai bergelombang berupa lahan kering dengan sebaran ketinggian 0-40 mdpl (BPS Kabupaten Banyuasin, 2020).

Indeks Resiko Bencana Tahun 2018 memasukkan Kabupaten Banyuasin dalam kategori Tinggi dengan skor 136,65. Berdasarkan RTRW Kabupaten Banyuasin tahun 2012-2032 yang dimaksud dengan kawasan rawan bencana adalah kawasan rawan genangan, kawasan kebakaran hutan dan lahan gambut, dan kawasan rawan puting beliung. Kawasan rawan genangan meliputi:

a. Tipe genangan A terletak di Kecamatan Makarti Jaya, Kecamatan Muara Padang, Kecamatan Banyuasin II dan Kecamatan Muara Sugihan;
b. Tipe genangan B terletak di wilayah Kecamatan Muara Sugihan, Muara Telang, Sumber Muara Telang, Makarti Jaya; dan
c. Tipe genangan C dan D merata di seluruh kecamatan.

Kawasan rawan kebakaran hutan meliputi Kecamatan Pulau Rimau, Banyuasin I, Muara Padang, Tungkal Ilir dan Muara Sugihan serta Taman Nasional (TN) Sembilang.

Kawasan rawan angin puting beliung terletak di Kecamatan Banyuasin I, Kecamatan, Kecamatan Air Kumbang, Kecamatan Banyuasin II, Kecamatan Betung, Kecamatan Pulau Rimau, Kecamatan Talang Kelapa, Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Muara Sugihan, Kecamatan Air Salek, dan Kecamatan Tanjung Lago.

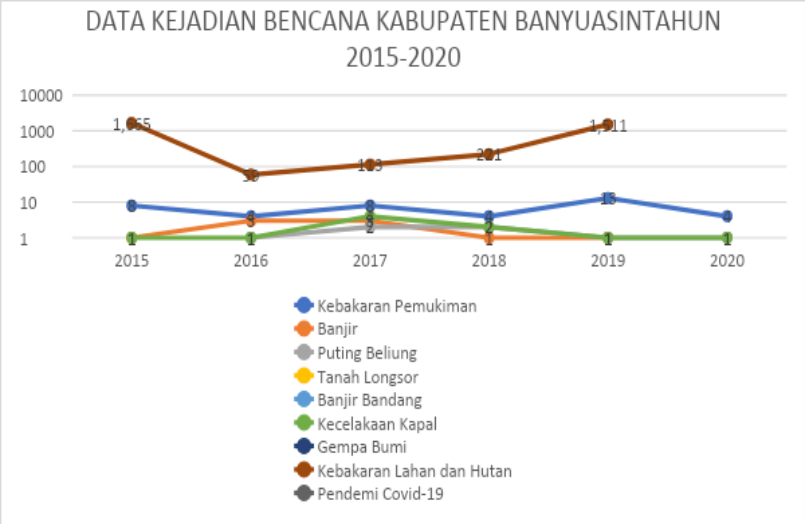

Gambar 20. Data Kejadian Bencana Kabupaten Banyuasin Tahun 2015-2020
Sumber: BPBD Prov. Sumsel
Keterangan: data kebakaran lahan dan hutan menggunakan data hot spot.

Berdasarkan data kejadian bencana kabupaten banyuasin tahun 2015-2020, bencana berulang yang terjadi adalah kebakaran hutan dan lahan, kebakaran permukiman, banjir, kecelakaan kapal, dan puting

beliung. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Banyuasin tahun 2015 dengan hotspot sebanyak 1.665 menurun tajam pada tahun 2016 hingga tahun 2019 secara berturut-turut yakni 59, 113, 221, dan kembali meningkat 1.511 hotspot. Kebakaran hutan dan lahan terjadi karena pengeringan lahan gambut yang dipicu oleh el nino dan aktivitas manusia dalam mengelola gambut sehingga membuat lahan rentan terbakar. Kebakaran pemukiman disebabkan karena kerapatan rumah penduduk di suatu wilayah, sambungan arus pendek listrik, maupun kelalain aktivitas manusia dalam mengendalikan penggunaan api. Kecelakaan kapal terjadi karena tingginya aktivitas transportasi diwilayah perairan Kabupaten Banyuasin baik angkutan barang ataupun angkutan penumpang. Banjir yang terjadi setiap tahun dari 2015 hingga tahun 2019 terjadi sebanyak 9 kali. Angin puting beliung terjadi sebanyak 7 kali terhitung sejak tahun 2016 hingga tahun 2020.

4.2.8 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terletak antara 4° 14' sampai 4° 55' Lintang Selatan dan 103° 22' sampai 104° 21' Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Ogan Ilir 5.493,94 km. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan merupakan kabupaten dengan wilayah dataran tinggi yang berbukit-bukit dengan ketinggian antara 45 sampai 1.643 meter di atas permukaan laut. Secara geografis, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terletak di ujung paling selatan dari wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Batas wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan:

- Utara : Kec. Ulu Ogan, Kec. Pengandonan, dan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu
- Selatan : Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung
- Barat : Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu dan Kec.Semendo Darat Ulu Kabupaten Muara Enim
- Timur : Kec.Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung

Terdiri dari 19 kecamatan dengan ketinggian mulai dari 117-1.065 mdpl dan ibu kota Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah Muara Dua (BPS Kabupaten OKU Selatan, 2020).

Berdasarkan Indeks Resiko Bencana Tahun 2018 yang dikeluarkan BNPB, Kabupaten OKU Selatan tergolong beresiko sedang dengan skor 130,00. Berdasarkan RTRW Kabupaten OKU Selatan, berikut kawasan rawan bencana:

- Kawasan tanah longsor terletak di Kecamatan Sungai Are, Sindang Danau, Pulau Beringin, Mekakau Ilir, Tiga Dihaji, Buay Sandang Aji dan Banding Agung;
- Kawasan rawan banjir meliputi Kecamatan Simpang, Buay Sandang Aji, Buay Rawan, Buay Pemaca, Muaradua, Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Runjung Agung, Banding Agung dan Warkuk Ranau Selatan;
- Kawasan rawan angin puting beliung meliputi Kecamatan Sungai Are, Kisam Tinggi dan Simpang; dan
- Kawasan rawan gempa bumi meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten.

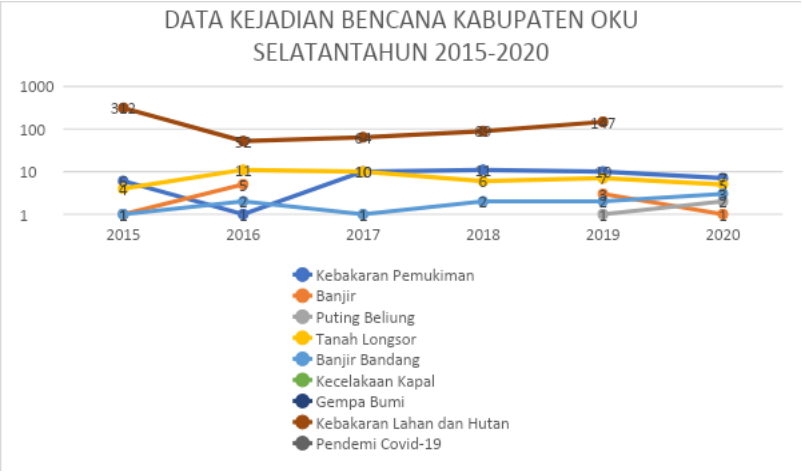

Gambar 21. Data Kejadian Bencana Kabupaten OKU Selatan Tahun 2015-2020
Sumber: BPBD Prov. Sumsel
Keterangan: data kebakaran lahan dan hutan menggunakan data hot spot.

Berdasarkan data kejadian bencana Kabupaten OKU Selatan tahun 2015-2020 kejadian bencana berulang yang terjadi adalah kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor dan kebakaran pemukiman, banjir, banjir bandang, dan angin puting beliung. Kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 hingga tahun 2019 terjadi karena femomena alam el nino sehingga hutan menjadi sangat rentan terbakar.

Tanah longsor terjadi setiap tahun dengan total 43 kejadian sepanjang tahun 2015 hingga 2020 disebabkan karena kondisi topografi

wilayah dataran tinggi dan berbukit-bukit dengan kemiringan lereng yang terjal dan curah hujan tinggi, serta perubahan vegetasi di lereng bukit dengan tanaman pertanian dan perkebunan memiliki akar yang kecil dan tidak cukup kokoh untuk menjaga struktur tanah tetap kuat. Kebakaran pemukiman disebabkan karena kerapatan rumah penduduk di suatu wilayah, sambungan arus pendek listrik, maupun kelalain aktivitas manusia dalam mengendalikan penggunaan api. Banjir terjadi sebanyak 10 kali selama tahun 2015 hingga 2020 kecuali pada tahun 2017 dan 2018. Banjir bandang terjadi sebanyak 11 kali selama tahun 2015 hingga tahun 2020, banjir bandang terjadi disebabkan karena berkurangnya luasan daerah resapan air pada wilayah hulu baik karena faktor alam ataupun aktivitas manusia dalam penggunaan lahan di wilayah hulu.

4.2.9 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Ogan Komering Ulu Timur merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata ± 45 mdpl, terletak pada posisi 103º40' - 104º33' Bujur Timur, serta 3º45' dan 4º55' Lintang Selatan. Luas wilayah Ogan Komering Ulu Timur, adalah berupa daratan seluas 337.000 Ha atau 3.370 Km^2 (BPS Kabupaten OKU Timur, 2020)dengan batas wilayah sebagai berikut.

- Utara : Kabupaten Ogan Komering Ilir
- Selatan : Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Provinsi Lampung
- Barat : Kabupaten Ogan Komering Ulu
- Timur : Kabupaten Ogan Komering Ilir

Secara topografis, wilayah Kabupaten OKU Timur dapat digolongkan ke dalam wilayah datar (*Peneplain Zone*), bergelombang (*Piedmont Zone*), dan sebagian lagi merupakan daerah berbukit yang memiliki ketinggian elevasi bervariasi, yaitu antara 42 meter sampai elevasi tertinggi mencapai 87 meter diatas permukaan laut (dpl) dan kemiringan lereng bervariasi antara 0-2% dan 2-15%. Wilayah datar terdapat di Kecamatan Belitang dan Kecamatan Buay Madang, sedangkan wilayah berbukit terdapat di sebagian Kecamatan Martapura.

Data kejadian bencana kabupaten OKU Timur tahun 2015-2020 bencana berulang yang terjadi adalah kebakaran hutan dan lahan, banjir, kebakaran pemukiman, puting beliung, dan banjir bandang. Berdasarkan Indeks Resiko Bencana Tahun 2018 yang dikeluarkan BNPB, Kabupaten OKU timur tergolong beresiko sedang dengan skor 131,20. Kebakaran

hutan dan lahan terjadi di tahun 2015 hingga tahun 2019 dengan jumlah hotspot berturut-turut sebanyak 302, 16, 58, 56, 338 hotspot. Banjir terjadi sebanyak 14 kali kecuali di tahun 2018. Banjir terjadi disebabkan karena curah hujan yang tinggi. Angin puting beliung terjadi sebanyak 5 kali selama tahun 2016 hingga 2019.

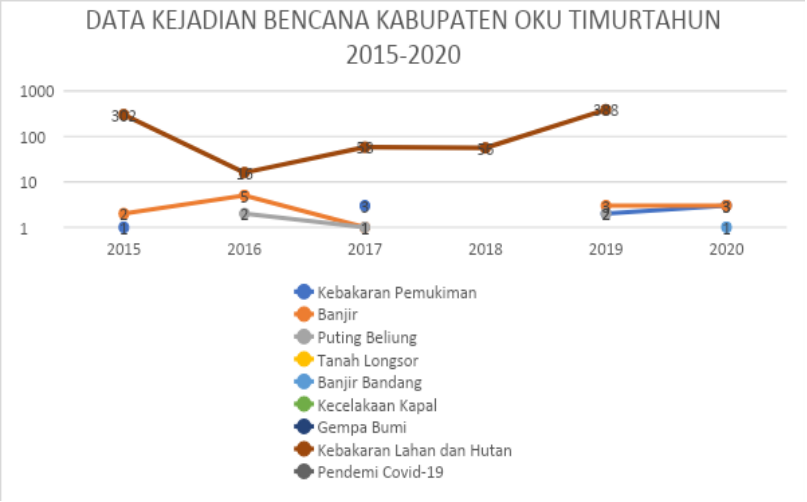

Gambar 22. Data Kejadian Bencana Kabupaten Oku Timur Tahun 2015-2020
Sumber: BPBD Prov. Sumsel
Keterangan: data kebakaran lahan dan hutan menggunakan data hot spot.

4.2.10 Kabupaten Ogan Ilir

Kabupaten Ogan Ilir terletak di antara $3^0$02' sampai $3^0$48' Lintang Selatan dan di antara $104^0$20' sampai $104^0$48' Bujur Timur. Kabupaten yang terbentuk pada tahun 2003 ini mempunyai luas wilayah 2.666,67 km^2 atau 266,607 Ha dan mempunyai ketinggian tempat rata-rata 8 meter di atas permukaan laut. Batas wilayah administrasi Kabupaten Ogan Ilir sebagai berikut:

- Utara : Kabupaten Banyuasin dan Kota Palembang
- Selatan : Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU)
- Timur : Kab. Ogan Komering Ilir dan Kabupaten OKU Timur
- Barat : Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih

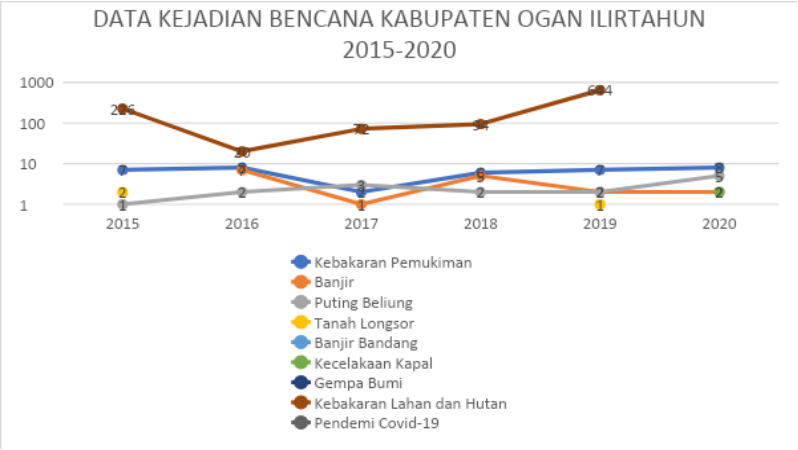

Gambar 23. Data Kejadian Bencana Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015-2020
Sumber: BPBD Prov. Sumsel
Keterangan: data kebakaran lahan dan hutan menggunakan data hot spot.

Kabupaten Ogan Ilir memiliki 16 kecamatan, dengan Indralaya sebagai ibu kota kabupaten (BPS Kabupaten Ogan Ilir, 2020). Wilayah Kabupaten Ogan Ilir terdiri memiliki topografi yang relatif datar dengan kemiringan lereng berkisar dari 0-5 %. Wilayah bagian utara Kabupaten Ogan Ilir merupakan hamparan dataran rendah berawa yang sangat luas mulai dari Kecamatan Pemulutan sampai Indralaya, sedangkan Kecamatan Tanjung Batu dan Muara Kuang relatif tinggi dengan tofograpi tertinggi diatas 10 mdpl. Wilayah daratan mencapai 65% dan rawa 35%. Rawa-rawa lebak tersebar di beberapa kecamatan, kecuali di Kecamatan Tanjung Batu dengan rawa lebak tidak begitu luas.

Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia 2018 yang dikeluarkan BNPB, Kabupaten Ogan Ilir merupakan salah satu daerah rawan bencana terkategori sedang dengan skor 132,40.

Berdasarkan data kejadian bencana Kabupaten Ogan Ilir tahun 2015-2020 kejadian bencana berulang yang terjadi adalah kebakaran hutan dan lahan, kebakaran pemukiman, banjir, puting beliung, tanah longsor, dan kecelakaan kapal. Kebakaran hutan dan lahan terjadi pada tahun 2015 hingga tahun 2020 dengan jumlah hotspot berturut-turut 226, 20, 72, 94, 644 hotspot. Kebakaran pemukiman disebabkan karena kerapatan rumah penduduk di suatu wilayah, sambungan arus pendek listrik, maupun kelalain aktivitas manusia dalam mengendalikan penggunaan api terjadi sebanyak 38 kali selama tahun 2015 hingga tahun

2020. Banjir terjadi sebanyak 17 kali kejadian selama tahun 2016 hingga tahun 2020 karena curah hujan yang tinggi dan terjadi pendangkalan sungai yang menyebabkan banjir. Angin puting beliung terjadi 15 kali selama tahun 2015 hingga tahun 2020, yang disebabkan pada musim hujan, penyebab angin puting beliung dipicu oleh pertumbuhan awan cumulonimbus (cb), sedangkan pada saat kemarau, proses terjadinya puting beliung disebabkan pusat tekanan rendah lokal di suatu tempat. Umumnya terjadi di tempat terbuka seperti perkebunan. Hal tersebut sangat wajar terjadi mengingat kondisi topografi wilayah Kabupaten Ogan Ilir dengan kelerengan 0-5% dan terdapat banyak hamparan dataran rendah berrawa. Sementara, tanah longsor adalah kejadian yang jarang terjadi, hanya 3 kali selama tahun 2015 hingga tahun 2020, biasa terjadi di sepanjang daerah aliran sungai.

4.2.11 Kabupaten Empat Lawang

Kabupaten Empat Lawang terletak antara 3° 25’ hingga 4° 01’ Lintang Selatan serta 102º37’ hingga 103° 11’ Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Empat Lawang memiliki batas-batas:

- Utara : Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu dan Kab. Musi Rawas
- Selatan : Kab. Lahat dan Kab. Seluma Provinsi Bengkulu;
- Barat : Kab. Rejang Lebong dan Kab. Kepahiang Prov. Bengkulu;
- Timur : Kabupaten Lahat.

Kabupaten Empat Lawang terdiri dari 10 Kecamatan. Kabupaten Empat Lawang merupakan daerah dengan ketinggian wilayah antara 50 hingga 2.500 mdpl. Luas wilayah Kabupaten Empat Lawang, adalah berupa daratan seluas 2.256,44 km^2 (BPS Kabupaten Empat Lawang, 2020). Topografi Empat Lawang relatif berbukit dan bergelombang yang membentuk sebagian besar wilayahnya, sehingga pada umum nya merupakan perbukitan. Relief perbukitan ini terbentuk karena wilayah Kabupaten Empat Lawang termasuk dalam lajur Pengunungan Bukit Barisan yang membentang di sepanjang Pulau Sumatera bagian barat.

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia 2018 yang dikeluarkan BNPB, Kabupaten Empat Lawang merupakan salah satu daerah rawan bencana terkategori tinggi dengan skor 158,00. Data kejadian bencana kabupaten empat lawang tahun 2015-2020, kejadian bencana berulang adalah kebakaran hutan dan lahan, kebakaran pemukiman, banjir, tanah longsor, banjir bandang, dan puting beliung. Kebakaran hutan dan lahan terjadi tahun 2015 hingga tahun 2019 dengan

jumlah hotspot pertahun secara berturut-turut adalah 119, 29, 44, 67, dan 213 hotspot. Kebakaran pemukiman disebabkan karena kerapatan rumah penduduk di suatu wilayah, sambungan arus pendek listrik, maupun kelalain aktivitas manusia dalam mengendalikan penggunaan api terjadi sebanyak 34 kali selama tahun 2015 hingga tahun 2020. banjir terjadi sebanyak 14 kali selama tahun 2015 hingga tahun 2020, hanya ditahun 2017 tidak terjadi banjir. Tanah longsor terjadi 7 kali, didaerah perbukitan yang disebabkan oleh hujan deras dan didukung oleh kemiringan lereng wilayah perbukitan.

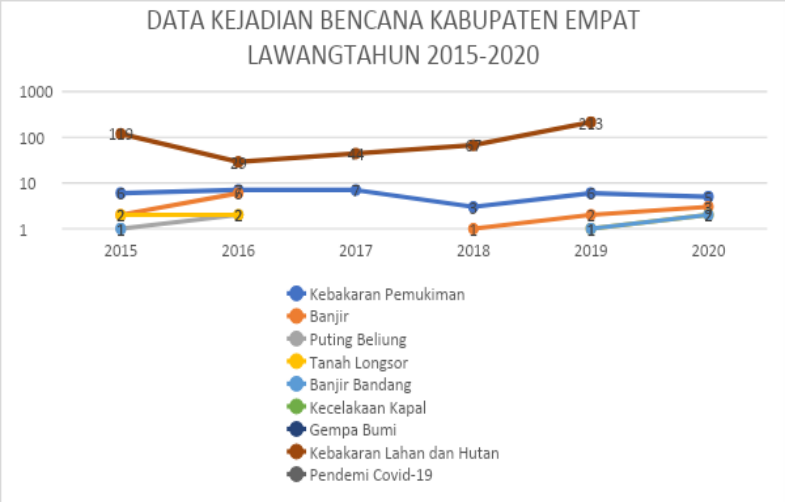

Gambar 24. Data Kejadian Bencana Kabupaten Empat Lawang Tahun 2015-2020
Sumber: BPBD Prov. Sumsel
Keterangan: data kebakaran lahan dan hutan menggunakan data hot spot.

4.2.12 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir merupakan daerah agraris dengan luas wilayah 1.840,00 km^2. Terbagi menjadi 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Talang Ubi, Kecamatan Tanah Abang, Kecamatan Penukal Utara, Kecamatan Penukal, dan Kecamatan Abab yang seluruhnya terdiri atas 91 desa definitif dan 6 kelurahan. Batas-batas wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir antara lain:

- Utara : Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin;
- Selatan : Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih;

- Timur : Kabupaten Muara Enim;
- Barat : Kabupaten Musi Rawas.

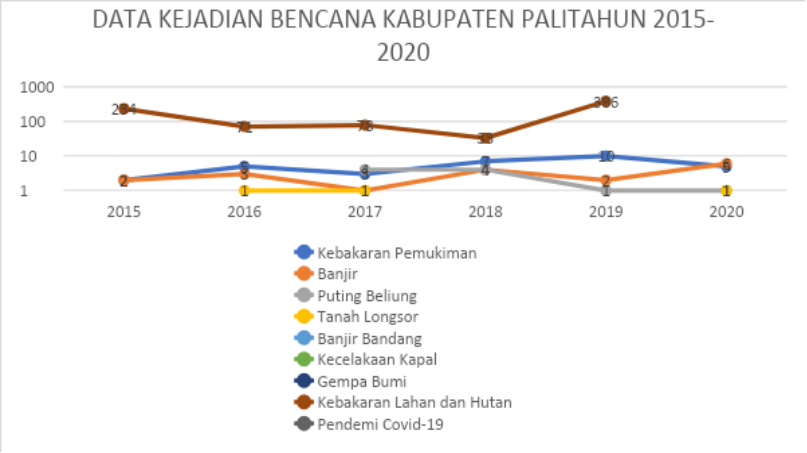

Gambar 25. Data Kejadian Bencana Kabupaten Pali Tahun 2015-2020
Sumber: BPBD Prov. Sumsel
Keterangan: data kebakaran lahan dan hutan menggunakan data hot spot.

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir digolongkan sebagai daerah dataran rendah. Berdasarkan daerah sebaran ketinggian menurut kecamatan, seluruh wilayahnya berada pada ketinggian kurang dari 100 mdpl (BPS Kabupaten PALI, 2020). Berdasarkan data kejadian bencana Kabupaten Pali tahun 2015-2020, bencana yang terjadi adalah kebakaran hutan dan lahan, kebakaran pemukiman, puting beliung, banjir, dan tanah longsor. Indeks Risiko Bencana Indonesia 2018 yang dikeluarkan BNPB, Kabupaten PALI merupakan salah satu daerah rawan bencana terkategori tinggi dengan skor 155,20. Kebakaran pemukiman disebabkan karena kerapatan rumah penduduk di suatu wilayah, sambungan arus pendek listrik, maupun kelalain aktivitas manusia dalam mengendalikan penggunaan api dengan jumlah kejadian sebanyak 32 kali selama tahun 2015 hingga tahun 2020. Banjir terjadi karena tingginya curah hujan sehingga menyebabkan luapan sungai Lematang. Angin puting beliung terjadi sebanyak 10 kali selama tahun 2017 hingga tahun 2020.

4.2.13 Kabupaten Musi Rawas Utara

Musi Rawas Utara merupakan salah satu kabupaten paling barat di Provinsi Sumatera Selatan. Musi Rawas Utara memiliki 7 (tujuh)

Kecamatan dengan luas wilayah 6.008,66 Km^2, dimana Kecamatan Ulu Rawas memiliki 24,18 persen dari total luas wilayah (BPS Kabupaten Musi Rawas Utara, 2020). Batas wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai berikut:

- Utara : Provinsi Jambi
- Selatan : Kabupaten Musi Rawas
- Barat : Provinsi Bengkulu
- Timur : Kabupaten Musi Banyuasin

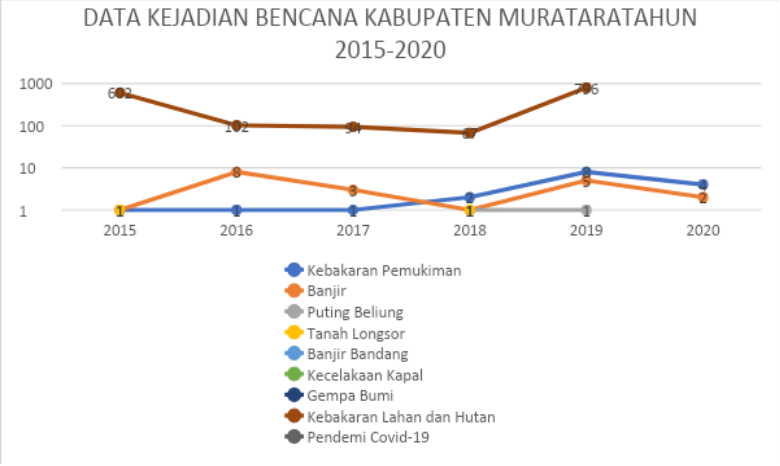

Gambar 26. Data Kejadian Bencana Kabupaten Muratara Tahun 2015-2020
Sumber: BPBD Prov. Sumsel
Keterangan: data kebakaran lahan dan hutan menggunakan data hot spot.

Berdasarkan data kejadian bencana Kabupaten Muratara tahun 2015-202, bencana yang terjadi adalah kebaran hutan dan lahan, banjir, kebakaran pemukiman, puting beliung, dan tanah longsor. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia 2018 yang dikeluarkan BNPB, Kabupaten Muratara merupakan salah satu daerah rawan bencana terkategori tinggi dengan skor 155,20. Dalam 6 tahun terjadi 20 kali banjir yang diakibatkan meluapnya Sungai Rawas maupun Sungai Rupit. Daerah terdampak banjir, umumnya berada di daerah pertemuan antara Sungai Rawas dan Sungai Rupit, serta di sepanjang aliran kedua sungai tersebut. Dari data RTRW Kabupaten Musi Rawas tahun 2011, kecamatan yang memiliki resiko tinggi terkena banjir diantaranya adalah Kecamatan Karang Dapo (220,81 km^2), Kecamatan Rawas Ilir (152,74 km^2), Kecamatan Karang Jaya (113,70 km^2) dan Kecamatan Rupit (47,57

km^2), Nibung (45,59 km^2) dan Rawas Ulu (16,34 km^2). Sementara itu, untuk resiko banjir sedang adalah di Kecamatan Karang Dapo (160,98 km^2), Kecamatan Rawas Ilir (139,04 km^2), Kecamatan Rupit (107,58 km^2) dan Kecamatan Rawas Ulu (47,50 km^2) (Chuzaimah, 2018). Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi selama tahuan 2015 hingga tahun 2019 disebabkan karena fenomena alam *el nino* dan aktivitas manusia dalam mengelolah lahan khususnya pada wilayah konsesi. Kebakaran pemukiman disebabkan karena kerapatan rumah penduduk di suatu wilayah, sambungan arus pendek listrik, maupun kelalain aktivitas manusia dalam mengendalikan penggunaan api dengan jumlah kejadian sebanyak 17 kali selama tahun 2015 hingga tahun 2020 angin puting beliung hanya terjadi 2 kali pada tahun 2018 dan 2019.

4.2.14 Kota Palembang

Kota Palembang terletak antara 2^o 52'-3^o 5' Lintang Selatan dan 104^o 37'-104^o 52' Bujur Timur. Ketinggian wilayah di Kota Palembang berkisar dari 4 -15 mdpl (BPS Kota Palembang, 2020). Batas wilayah Kota Palembang, yaitu:

- Utara : Kabupaten Banyuasin
- Selatan : Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Ilir.
- Timur : Kabupaten Banyuasin
- Barat : Kabupaten Banyuasin (BPS Kota palembang, 2020)

Berdasarkan data kejadian bencana Kota Palembang tahun 2015-2020, bencana yang paling sering terjadi adalah kebakaran pemukiman dan beberapa kejadian banjir, kebakaran hutan dan lahan, puting beliung, dan kecelakaan kapal. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia 2018 yang dikeluarkan BNPB, Kota Palembang merupakan salah satu daerah rawan bencana terkategori sedang dengan skor 131,60.

Berdasarkan RTRW Kota Palembang tahun 2012-2023 yang dimaksud dengan kawasan rawan bencana alam adalah kawasan rawan bencana genangan dan kawasan rawan bencana kebakaran. Kawasan rawan bencana banjir berada di sepanjang sungai dan kawasan rawan bencana kebakaran berada di kawasan pemukiman. Tingginya tingkat kebakaran didukung banyaknya pemukiman padat penduduk. Kecamatan Kertapati dan Tangga Buntung merupakan dua kecamatan yang paling rawan terjadi kasus kebakaran. Rumah penduduk di kedua kecamatan tersebut, mayoritas terdiri dari bahan yang mudah terbakar, seperti kayu dan tripleks (Citra, 2020). Kebakaran pemukiman disebabkan karena

kerapatan rumah penduduk di suatu wilayah, sambungan arus pendek listrik, maupun kelalain aktivitas manusia dalam mengendalikan penggunaan api dengan jumlah kejadian sebanyak 102 kali selama tahun 2015 hingga tahun 2020. Wilayah kecamatan rawan kebakaran hutan dan lahan di Kota Palembang tahun 2019 yakni Kecamatan Gandus, Kecamatan Alang-Alang Lebar, dan Kecamatan Ilir Barat I (BPS Kota Palembang, 2020). Selama tahun 2015 hingga tahun 2020 terjadi kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kota Palembang sebanyak 57 kali. Kecelakaan kapal terjadi sebanyak 2 kali pada tahun 2015 dan tahun 2018. Sementara angin puting beliung terjadi sebanyak 3 kali pada tahun 2018 dan 2019.

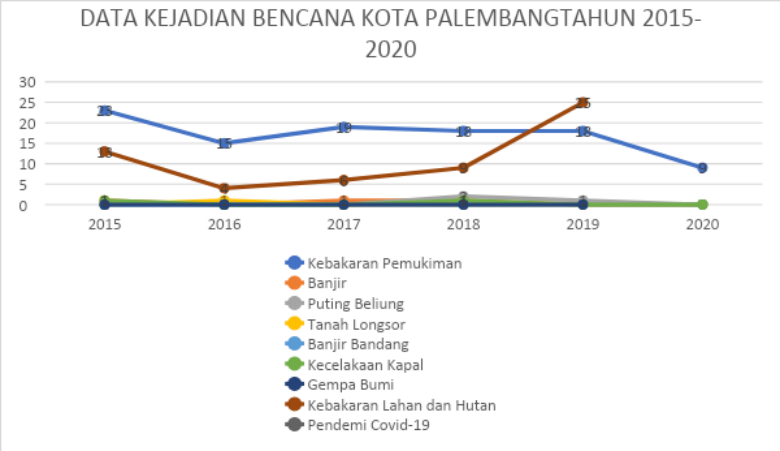

Gambar 27. Data Kejadian Bencana Kota Palembang Tahun 2015-2020
Sumber: BPBD Prov. Sumsel
Keterangan: data kebakaran lahan dan hutan menggunakan data hot spot.

4.2.15 Kota Prabumulih

Kota Prabumulih terletak pada posisi 3°-4° Lintang Selatan dan 104°- 105° Bujur Timur. Ketinggian wilayah Kota Prabumulih yaitu 32-54 mdpl (BPS Kota Prabumulih, 2020). Batas wilayah Kota Prabumulih sebegai berikut.

- Utara : Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten PALI
- Selatan : Kabupaten Muara Enim
- Timur : Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Ilir
- Barat : Kabupaten Muara Enim

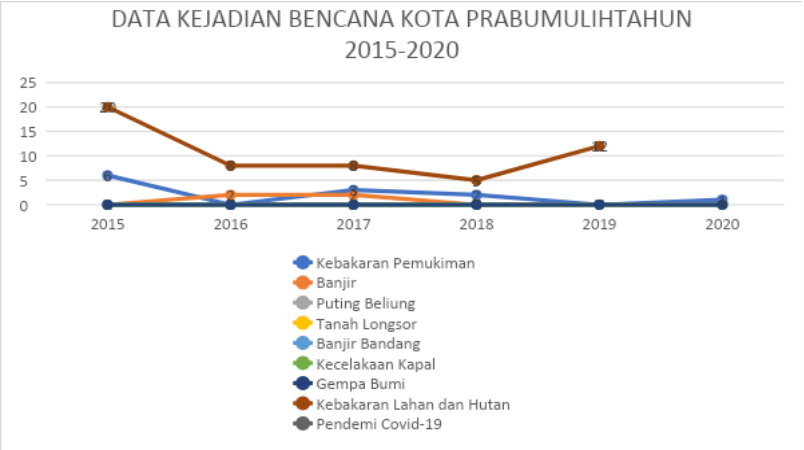

Gambar 28. Data Kejadian Bencana Kota Prabumulih Tahun 2015-2020
Sumber: BPBD Prov. Sumsel
Keterangan: data kebakaran lahan dan hutan menggunakan data hot spot.

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia 2018 yang dikeluarkan BNPB, Kota Prabumulih merupakan salah satu daerah rawan bencana terkategori sedang dengan skor 132. Berdasarkan data kejadian bencana Kota Prabumulih tahun 2015-2020, bencana bencana berulang yang terjadi adalah kebakaran hutan dan lahan, kebakan pemukiman dan banjir. Kebakaran hutan dan lahan terjadi sebanyak 53 kali kejadian selama tahun 2015 hingga tahun 2019, dengan jumlah hotspot berturut-turut 20, 8, 8,5, dan 12 hotspot. Kebakaran pemukiman terjadi sebanyak 12, Kebakaran pemukiman disebabkan karena kerapatan rumah penduduk di suatu wilayah, sambungan arus pendek listrik, maupun kelalain aktivitas manusia dalam mengendalikan penggunaan api. Banjir hanya terjadi 4 kali selama tahun 2015 hingga tahun 2020 yaitu pada tahun 2016 dan tahun 2017.

4.2.16 Kota Pagar Alam

Kota Pagar Alam berada pada posisi 4° Lintang Selatan (LS) dan 103, 15° Bujur Timur (BT). Sebagai salah satu Kota di Provinsi Sumatera Selatan, Pagar Alam terletak sekitar 298 Km dari Kota Palembang serta berjarak 60 Km di sebelah barat daya dari Kabupaten Lahat. Kota Pagar

Alam memiliki Luas wilayah 633,66 km² (BPS Kota Pagar Alam, 2020). Batas daerah Pagar Alam adalah:

- Utara : Kabupaten Lahat
- Selatan : Provinsi Bengkulu
- Barat : Kabupaten Lahat
- Timur : Kabupaten Lahat dan Kabupaten Muara Enim

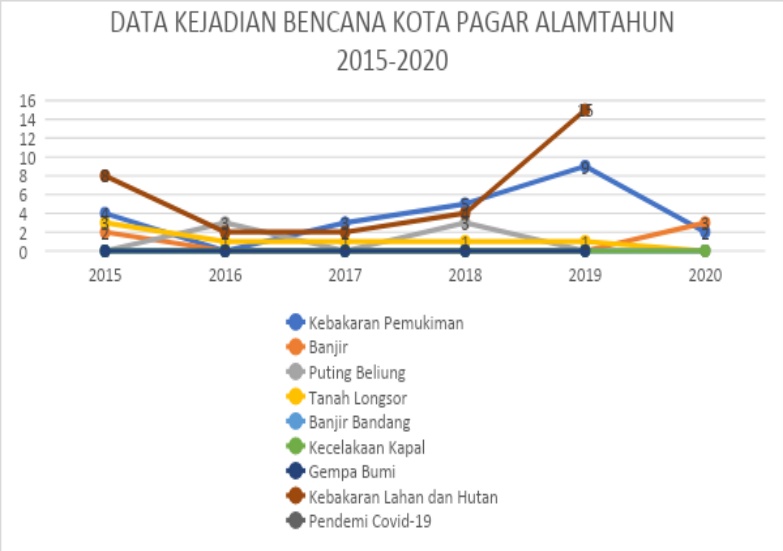

Gambar 29. Data Kejadian Bencana Kota Pagar Alam Tahun 2015-2020
Sumber: BPBD Prov. Sumsel
Keterangan: data kebakaran lahan dan hutan menggunakan data hot spot.

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia 2018 yang dikeluarkan BNPB, Kota Pagaralam merupakan salah satu daerah rawan bencana terkategori sedang dengan skor 126,40. Berdasarkan data kejadian bencana Kota Pagaralam tahun 2015-2020, bencana bencana berulang yang terjadi adalah kebakaran pemukiman, kebakran hutan dan lahan, tanah longsor, puting beliung, dan banjir. Kebakaran pemukiman disebabkan karena kerapatan rumah penduduk di suatu wilayah, sambungan arus pendek listrik, maupun kelalain aktivitas manusia dalam mengendalikan penggunaan api dengan jumlah kejadian sebanyak 23 kejadian. Kebakaran hutan dan lahan terjadi sebanyak 31 kali selama tahun 2015 hingga tahun 2020 dengan hotspot 8, 2, 2, 4, dan 15 hotspot disebabkan karena aktivitas manusia dalam membuka atau mengelola lahan. Tanah longsor terjadi sebanyak 7 kali selama tahun 2015 hingga

tahun 2020. Tanah longsor terjadi karena curah hujan yang tinggi dan kemiringan lereng >40^0 di beberapa wilayah Kota Pagar Alam, semakin besar tingkat kemiringan lereng maka semakin besar potensi terjadinya longsor. Angin puting beliung terjadi sebanyak 6 kali pada tahun 2016 dan tahun 2018.

4.2.17 Kota Lubuk Linggau

Kota Lubuklinggau berada antara 102^o 40' 00" – 103^o 0' 00" Bujur Timur (BT) dan 3^o 4' 10" – 3^o 22' 30" Lintang Selatan (LS). Secara geografi, Kota Lubuklinggau memiliki posisi strategis pada jalur transportasi lintas Sumatera. Luas wilayah daerah ini berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 2001 adalah 401,50 Km^2 atau 40.150 Ha dan berada pada ketinggian 129 mdpl . Batas wilayah Kota Lubuklinggau adalah:

- Utara : Kec. BKL. Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas.
- Timur : Kec. Tugu Mulyo dan Muara Beliti Kab. Musi Rawas.
- Selatan : Kec. Muara Beliti Kab. Musi Rawas dan Prov. Bengkulu.
- Barat : Provinsi Bengkulu. (BPS Lubuk Linggau,2020)

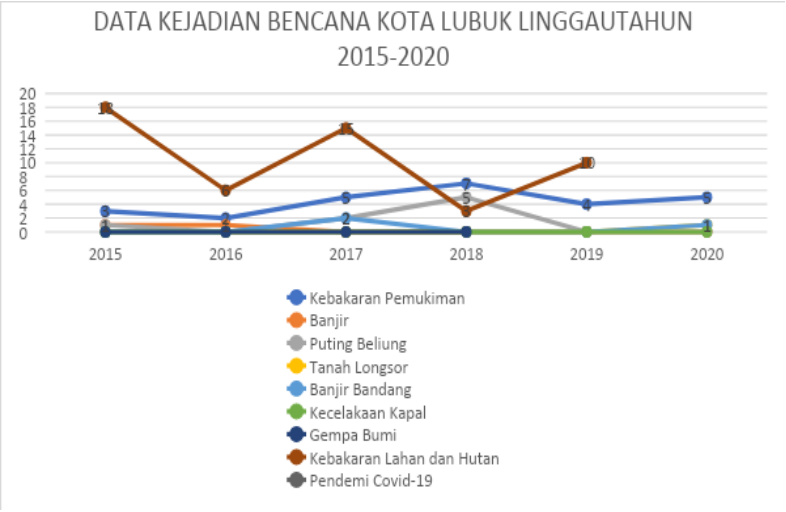

Gambar 30. Data Kejadian Bencana Kota Lubuk Linggau Tahun 2015-2020
Sumber: BPBD Prov. Sumsel
Keterangan: data kebakaran lahan dan hutan menggunakan data hot spot.

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia 2018 yang dikeluarkan BNPB, Kabupaten OKU merupakan salah satu daerah rawan bencana terkategori dengan skor 124,80. Berdasarkan data kejadian

bencana Kota Lubuk Linggau tahun 2015-2020, bencana dengan kejadian berulang adalah kebakaran hutan dan lahan, kebakaran pemukiman, puting beliung, banjir bandang, dan banjir. Kebakaran hutan dan lahan terjadi sebanyak 52 kali selama tahun 2015 hingga tahun 2020 dengan jumlah hotspot beruturut-turut sebanyak 18, 6, 15, 3 dan 10 hotspot. Tahun 2019 kebakaran hutan dan lahan di Kota Lubuk Linggau bertepatan dengan kemarau yang disebabkan sebagian besar karena puntung rokok yang dibuang sembangaran. Kebakaran pemukiman disebabkan karena kerapatan rumah penduduk di suatu wilayah, sambungan arus pendek listrik, maupun kelalain aktivitas manusia dalam mengendalikan penggunaan api yang terjadi sebanyak 26 kali selama tahun 2015 hingga tahun 2020. Angin puting beliung terjadi sebanyak 8 kali yang terjadi pada tahun 2015, 2017, dan 2018.

Berdasarkan RTRW Kota Lubuk Linggau tahun 2012-2032 yang dimaksud dengan kawasan rawan bencana alam adalah kawasan rawan bencana longsor, seluas kurang lebih 2.880 Ha meliputi kawasan Kaki Bukit Sulap di Kelurahan Joyo Boyo, Kelurahan Ulak Surung Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kelurahan Sidorejo Kecamatan Lubuklinggau Barat II, Kelurahan Petanang Ilir, Kelurahan Petanang Ulu sebagian Kelurahan Marga Bakti, Kelurahan Durian Rampak, Kelurahan Taba Baru, Kecamatan Lubuklinggau Utara I.

DAFTAR PUSTAKA

BNPB. 2016. Kajian Risiko Bencana Sumatera Selatan 2016-2020. Jakarta, Indonesia.

Dishut Sumsel. 2020. Sumatera selatan. Palembang: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.

BNPB. 2018. Indeks Resiko Bencana Indonesia Tahun 2018. Jakarta, Indonesia.

BPS Kabupaten Banyuasin, 2020. Banyuasin dalam Angka 2020.

BPS Kabupaten Empat Lawang, 2020. Empat Lawang dalam Angka 2020.

BPS Kabupaten Lahat, 2020. Lahat dalam Angka 2020.

BPS Kabupaten Muara Enim, 2020. Muara Enim dalam Angka 2020.

BPS Kabupaten Musi Banyuasin, 2020. Musi Banyuasin dalam Angka 2020.

BPS Kabupaten Musi Rawas, 2020. Musi Rawas dalam Angka 2020.

BPS Kabupaten Musi Rawas Utara, 2020. Musi Rawas Utara dalam Angka 2020.

BPS Kabupaten Ogan Ilir, 2020. Ogan Ilir dalam Angka 2020.

BPS Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2020. Ogan Komering Ilir dalam Angka 2020.

BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu, 2020. Ogan Komering Ulu dalam Angka 2020.

BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, 2020. Ogan Komering Ulu Timur dalam Angka 2020.

BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, 2020. Ogan Komering Ulu Selatan dalam Angka 2020.

BPS Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, 2020. Penukal Abab Lematang Ilir dalam Angka 2020.

BPS Kota Palembang, 2020. Palembang dalam Angka 2020.

BPS Kota Prabumulih, 2020. Prabumulih dalam Angka 2020.

BPS Kota Pagar Alam, 2020. Pagar Alam dalam Angka 2020.

BPS Kota Lubuk Linggau, 2020. Lubuk Linggau dalam Angka 2020.

BPS Sumsel, 2020. Nama dan Panjang Sungai DAS Musi di Provinsi Sumatera Selatan menurut Nama Sungai Utama dan Anak Sungai, 2014. Diakses tanggal 23 Desember 2020 pada https://sumsel.bps.go.id/statictable/2015/03/16/18/nama-dan-panjang-sungai-das-musi-di-provinsi-sumatera-selatan-menurut-nama-sungai-utama-dan-anak-sungai-2013-.html

Bupati Muara Enim. 2018. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2038.

Bupati Lahat. 2012. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012-2032.

Bupati Banyuasin. 2012. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kaabupaten Banyuasin Tahun 2012-2032.

Bupati Ogan Komering Ulu Selatan. 2012. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu SelatannTahun 2012-2032.

Bupati Musi Banyuasin. 2016. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016-2036.

Budiningsih Kushartati. 2017. Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan.Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 14 No.2, November 2017: 165-186.

Citra Iasha. 2020. Implementasi kebijakan Penempatan Pos-pos Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Palembang. Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan. Vol. 3 No. 1, September 2020. ISSN 2654-3141.

Chuzaimah 2018. Potensi dan Kendala Sektor Pertanian pada Zona Sub DAS Rawas di Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan.Jurnal Lahan Suboptimal 7 (2):181.

Duffin E. 2020. Countries with the most natural disasters in 2019. [accessed 2020 Nov 10]. https://www.statista.com/ statistics/269652/countries-with-the-most-natural-disasters/.

Fransiska L, Tjahjono B, Gandasasmita K. 2017. Studi Geomorfologi dan Analisis Bahaya Longsor di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Tanah dan Lahan. 1(1):51–57.

Guha-Sapir D, Hoyois P, Wallemacq P, Regina B. 2016. Annual Disaster Statistical Review 2016: The Numbers and Trends. Brussels. https://www.emdat.be/sites/default/files/adsr_2016.pdf.

Haryadi W. 2012. Gempa Tektonik Di Pulau Sumbawa Dan Dampaknya Terhadap Bangunan Sipil (Suatu Kajian Geologis). Ganec Swara. 6(2):13.

Pemprov. Sumsel. 2021. Situasi Terkini Perkembangan Corona Virus Disease-19 (Covid-19) Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 2 Januari 2021. http://corona.sumselprov.go.id/index.php?module=

dataterkinidetail&id=323. Diakses 3 Januari 2021.

Rezeky S M, Panjaitan N K, Sjaf S. 2018. Sistem Nilai dan Resiliensi Komunitas dalam Pengelolaan Rawa Lebak. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | Vol 6 No 3 Desember 2018, hal 220-227.

Rosihan A, Wulandari S, Devi P. 2019. Informasi Mitigasi Bencana Alam di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Jurnal Ilmu Komunikasi dan Bisnis, vol 4 no 1 2019. ISSN 2541-0741

Tata Lestari Hesti, Budi Hadi Narendra, Mawazin. 2017. Tingkat Kerawanan Kebakaran Gambut di Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan. Jurnal Penelitian Hutan Tanaman, vol 14 no. 1 Juni 2017, hal 51.

Oktari RS. 2019. Peningkatan Kapasitas Desa Tangguh Bencana. J Pengabdi Kpd Masy. 4(2):189. doi:10.22146/jpkm.29960.

Suharyani, Putri NQ, Candra A, Hutapea E, David F, Annysha YA. 2016. Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Ekoregion Sumatera Berbasis Jasa Ekosistem. Pekanbaru.

Wahyunto, S. Ritung, Suparto dan H. Subagjo. 2005. Sebaran Gambut dan Kandungan Karbon di Sumatera dan Kalimantan. Proyek Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia. Bogor: Wetlands International-Indonesia Programme dan Wildlife Habitat Canada.

Walikota Lubuk Linggau. 2012. Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuk Linggau Tahun 2012-2032.

Walikota Palembang. 2012. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2032.